



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI  
DENGAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
DAN KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 6 April 2020
Waktu	: 10.00 WIB s.d 12.45 WIB
Tempat	: Ruang rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Jl. Jend Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI)
Acara	: Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan Sebagai Tindak Lanjut Inpres Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. Hadir 39 Anggota DPR RI dari 55 Anggota Komisi IV, dengan rincian:  <b>1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)</b> 7 dari 12 orang Anggota 1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI 2. H. Yadi Srimulyadi 3. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si. 4. Vita Ervina, S.E., M.B.A. 5. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.

6. Maria Lestari, S.Pd.
7. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

**2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)**

5 Dari 8 orang Anggota

1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua
2. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
3. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
4. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.
5. Alien Mus

**3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)**

6 dari 7 orang Anggota

1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil ketua
2. Ir. KRT. H. Dadori Wonodipuro, M.M.
3. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
4. Ir. Sumail Abdullah
5. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, Dess., M.Sc.
6. Ir. H. T. A. Khalid, M,M.

**4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)**

5 dari 6 orang Anggota

1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si./Wakil Ketua
2. Fauzi H. Amro, M.Si.
3. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
4. H. Charles Meikyansah
5. Julie Sutrisno

**5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)**

6 dari 7 orang Anggota

1. Daniel Johan/Wakil Ketua
2. H. Muhtarom, S.Sos.
3. Luluk Nur Hamidah, M.Si, M.P.A
4. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.
5. Drs. H. Ibnu Multazam
6. Edward Tannur, S.H.

**6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)**

3 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
3. Muslim, S.HI., M.M.

**7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)**

4 dari 5 orang Anggota

1. drh. H. Slamet
2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
3. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
4. H. Johan Rosihan, S.T.

**8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)**

2 dari 4 orang Anggota

1. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
2. Slamet Aryadi, S.Psi.

**9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)**

1 dari 2 orang Anggota

1. Ema Umiyyatul Chusnah

**10. Sekretariat Jenderal**

**B. Pemerintah:**

1. Edhy Prabowo, M.M., M.B.A. (Menteri Kelautan dan Perikanan);
2. Irjen Antam Novambar (Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
3. Muhammad Yusuf (Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
4. M. Zulficar Mochtar, S.T., M.Sc. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);
5. Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan);
6. Dr. Ir. Aryo Hanggono, DEA. (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan);
7. Ir. R. Nilanto Perbowo, M.Sc. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
8. Dr. TB. Haeru Rahayu (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
9. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan); dan
10. Dr. Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan).

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):**

Pimpinan Komisi IV DPR RI yang tidak bisa hadir di ruang rapat ini.

Yang saya hormati teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI,  
Yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya,  
Serta hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat ini, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja hari ini dalam keadaan sehat wal'fiat.

Adapun hari ini Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk memenuhi ketersediaan pangan sebagai tindak lanjut atas Inpres No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Rapat ini kita mulai pukul 10.00 WIB, bisa disetujui?

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)**

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Berdasarkan informasi dari organisasi kesehatan dunia WHO, penyebaran COVID-19 menunjukkan peningkatan yang sangat masif dari hari ke hari. Data ini juga didukung oleh Johns Hopkin COVID-19. Dimana tercatat dari 1.202.236 jiwa data per tanggal 6 April 2020. Dilaporkan positif dengan jumlah kasus kematian lebih dari 64.753. Indonesia termasuk negara yang terkena dampak berbagai aspek mulai sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan serta yang terpenting adalah aspek kesejahteraan rakyat Republik Indonesia.

Untuk tanggal 2020 laporan positif terkena COVID-19 sebanyak 2.092 jiwa yang sembuh 150 dan yang meninggal hingga tadi malam 198 jiwa. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta penjelasan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dalam melakukan upaya langkah tindak lanjut kebijakan antisipasi percepatan penanganan dampak COVID.

Yang pertama, refocusing kegiatan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa sebagai amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020. Kedua, terobosan perencanaan kegiatan prioritas yang akan dikerjakan. Ketiga, pendataan stok ikan, ini yang paling penting di cold storage yang ada di seluruh Indonesia dalam rangka memastikan pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat. Keempat, upaya pemberian stimulus ekonomi kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan. Kelima, kepastian akan penyerapan hasil perikanan dan perikanan masyarakat oleh pelaku usaha dan BUMN

Perikanan. Keenam, aksi bakti cepat tanggap dilapangan yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti bentuk bantuan ikan segera atau olahan, ikan yang kemasannya praktis dan mudah dikonsumsi langsung.

Demikian pengantar kami sampaikan, selanjutnya kami persilakan kepada saudara Menteri untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas.

Silakan Bapak Menteri.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (Dr. EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):**

Terima kasih Bapak Ketua, Bapak Pimpinan Rapat.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Selamat pagi,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
*Om swasti astu,*  
*Namo budaya,*  
Salam kebajikan.

Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI,  
Para pejabat Eselon I beserta seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan yang semuanya telah tersambung secara virtual pada pagi ini.

Bapak Ketua, kami ijin melaporkan sebagian besar seluruh Eselon I ada di ruangan ini, namun kami menjaga jarak cukup jauh dari yang disarankan Pemerintah 1,5 meter lebih sedikit, hadir lengkap.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan Rapat Kerja virtual antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI membahas Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk memenuhi ketersediaan pangan sebagai tindak lanjut atas Inpres No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 4 Tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, KKP akan melakukan revisi internal dari setiap Eselon I, sehingga tidak merubah pagu per program. Kegiatan yang direncanakan meliputi, yang pertama pengadaan bahan dan peralatan seperti masker, hand sanitizer, vitamin, operasional Satgas COVID KKP, APD, Rapid Test, insentif tenaga kesehatan KKP dan lain-lain dengan merealokasi belanja operasional perkantoran pada Satker Pusat dan UPT di bawah.

Yang kedua, perluasan sasaran penerimaan manfaat program gemar ikan untuk pertama tenaga medis di 10 rumah sakit di Jakarta. Kedua, masyarakat yang terdampak seperti sopir ojol, sopir taksi, sopir angkutan umum di Jakarta dan sekitarnya. Tiga, masyarakat pemegang kartu keluarga sejahtera. Sehingga pagu alokasi anggaran KKP tahun 2020 masih berdasarkan kesimpulan Rapat Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI tanggal 25 Februari 2020 dan surat MKP ke Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor B159/MKP/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, hal usulan pemutakhiran rencana kerja dan anggaran KKP tahun 2020 dalam rangka mendukung perikanan budidaya, yakni penambahan Rp300 miliar untuk Dirjen Perikanan Budidaya. Namun demikian, apabila nanti ada arahan dari Ketua dan para Wakil Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI. Manakala ada penajaman atau penambahan di beberapa usulan-usulan lain kami siap untuk menjalankan perintahnya.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

KKP akan melakukan langkah antisipatif untuk percepatan penanganan dampak COVID-19, antara lain yang pertama mendata semua hasil produksi perikanan tangkap, estimasi produksi perikanan laut April sampai Juni 2020 sebesar 1.670.313 ton. Kedua, estimasi produksi perikanan perairan darat April sampai Juni 2020 sebesar 131.499 ton. Yang kedua, mendata semua hasil produksi perikanan budidaya, estimasi panen udang April sampai Juni 2020 sebesar 104.941 ton. Kedua, estimasi panen ikan laut April sampai Juni 2020 sebesar 4.401 ton, estimasi panen ikan air tawar April sampai Juni 2020 sebesar 341.494 ton. Yang ketiga, mendata semua infrastruktur rantai dingin total kapasitas cold storage KKP, swasta dan BUMD. Ini dalam rangka untuk mengantisipasi manakala nanti pada saat kita sudah tahu hasil panen, estimasi hasil panen, kemudian diindikasikan harga akan turun dan sebagainya sehingga akan kami maksudkan untuk peran Pemerintah atau peran swasta yang bisa kita kondisikan atau kita sampaikan bahwa untuk bisa membeli dari seluruh panen ini.

Ketua, dari analisa kami yang ada dilapangan berdasarkan data dan faktanya beberapa panen karena kekhawatiran kondisi COVID ini membuat kekhawatiran sehingga harganya tiba-tiba turun. Padahal sebenarnya kebutuhan terhadap hasil panen kita ini merupakan salah satu solusi dan sangat diharapkan untuk bisa memenuhi pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai misal pada saat kami melepas ekspor ke beberapa negara Eropa dan Amerika permintaannya sampai sekarang belum ada yang turun. Memang ada kecenderungan turun namun sampai sekarang seperti ke Italia, permintaannya masih sangat tinggi, ini berdasarkan pengakuan lapangan.

Ada dua kesimpulan yang kami temukan terhadap masalah ini. Yang pertama, adanya panen ini dipicu oleh sentiment pasar negatif terhadap kekhawatiran panen itu tidak ada yang beli sehingga para pelaku ini khawatir makanya ada yang melakukan panen cepat. Atau yang kedua, mereka tidak tahu bahwa ternyata produksi ini atau mereka mau butuh produk tapi produksinya tidak ada. Sebagai misal ada satu perusahaan yang kekurangan

bahan baku disisi lain ada bahan baku yang tidak terjual. Ini mungkin upaya yang proaktif yang kami lakukan kedepan Bapak Ketua.

Yang keempat, rencana penguatan terhadap hasil-hasil produksi perikanan. Mencari jalan keluar terhadap akses pemasaran, antara lain melalui fasilitas antara produsen dan pasar melalui supply dan demand, fasilitasi antara produsen dan pasar. Yang kedua, memastikan produk perikanan terserap dengan harga yang sesuai. Ketiga, intervensi APBN manakala nanti diperlukan dengan membeli langsung produk menggunakan pake stimulus dan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial melalui program PKH. Kami sudah melakukan Bapak Ketua, dengan menambahkan paket ikan untuk dapat dimanfaatkan dengan adanya tambahan 40.000 per KK per bulan.

Dari perkembangan terakhir, dengan rencana Pemerintah untuk menambah memberikan santunan kepada 2.600.000 orang di Jabodetabek ini juga kami sudah berkomunikasi dengan Menteri Sosial untuk bisa dilibatkan dari produk-produk perikanan kita. Sedang kami jajaki kelapangan dan kami setelah ini juga Dirjen-dirjen kami akan berkordinasi dengan Kementerian Sosial.

Selanjutkan melaksanakan program bulan bakti perikanan dengan tema lawan corona dengan makan ikan. Karena Bapak Ketua, kita semua tahu protein adalah salah satu zat yang bisa menguatkan daya tahan tubuh. Corona ini saya yakin kalau bicara obat belum ada obatnya, tapi bicara penanganan yang paling utama adalah menghindari atau social distancing, yang kedua adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satu kekuatan meningkatkan daya tahan tubuh disupply melalui produk-produk perikanan.

Selanjutnya hasil pendataan yang telah kami kumpulkan, yakni data produksi perikanan tangkap. Terdapat kenaikan volume produksi triwulan I tahun 2020, namun harga turun. Ini sementara di lapangan yang kami dapat. Terdapat 76.900 ton produksi perikanan tangkap tercatat di UPT Pelabuhan Perikanan pada Triwulan I dengan nilai Rp1,35 triliun. C. bila dilihat per pulau besar komoditi yang mendominasi antara lain tongkol. D. prognosa produksi perikanan tangkap sampai akhir tahun 2020 untuk ikan laut mencapai 7,13 juta ton dan ikan perairan darat sebesar 566,5000 ton.

Kedua, data perikanan budidaya. Dalam 3 bulan kedepan April sampai Juni 2020 terdapat potensi panen ikan air tawar sebesar 341,4000 ton dan ikan laut sebesar 4,4 ribu ton dan udang 104,9000 ton. Adanya pendemik COVID menyebabkan harga udang dan ikan laut turun dan potensi panen yang terserap pasar. Demikian juga ikan air tawar yang bila terjadi penurunan permintaan akan menyebabkan harga turun.

Berikutnya adalah harga produksi hasil budidaya dan data perbandingan harga pada Desember 2019 yang terus cenderung turun. Ini data Bapak Ketua, dan ini kami sedang mencari jalan keluar, dan *Insyah Allah* kami sangat optimis Bapak Ketua. Dan *Insyah Allah* kami sangat optimis Bapak Ketua, kenapa? Dalam kondisi apapun pada akhirnya orang tetap akan makan. Dan makan mungkin restoran sekarang tutup, tempat-tempat kantin tutup, tapi kami sangat yakin kebutuhan terhadap pangan tidak akan pernah berhenti.

Ketua, tadi data cold storage sudah kami sampaikan. Berdasarkan hasil sample 22 unit pengolahan ikan diperoleh data bahwa masih terdapat 41,2% kapasitas cold storage yang belum terpakai. Sebarannya nanti kami akan detailkan lagi Bapak Ketua. Berikut, adanya data harga cold storage. Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Dalam menghadapi percepatan penanganan COVID-19, KKP telah berkordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk dapat memberikan paket stimulus ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.

Bapak Ketua, sebagai bahan laporan bahwa memang kelihatan kecenderungan meningkatnya wabah COVID-19 di Indonesia ini baru diawali Bulan Maret. Namun, kami Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak COVID mulai dari Wuhan kami sendiri sudah melakukan langkah antisipasi berkordinasi dengan Menteri Kesehatan, bahwa semua wilayah karantina kita di seluruh ujung tombak perbatasan, bandara, pelabuhan, kami sudah siagakan untuk berkordinasi dengan KKP Pelabuhan Kesehatan, kantor karantina pelabuhan yang milik kesehatan. Dan ini sudah kita lakukan, kami meminta Kepala Badan BKIPM kami, karantina kami untuk melakukan edaran dan sudah dilakukan Bapak Ketua. Jadi ini sebagai catatan bahwa kami sudah sigap sebelum ini terjadi Bapak Ketua.

Kemudian dalam menghadapi percepatan penanganan COVID-19, yang pertama membantu penyerapan hasil tangkapan nelayan dan hasil budidaya ikan serta produk dari UMKM Perikanan di daerah agar usahanya berlanjut. KKP mengusulkan, yang pertama dalam melaksanakan program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai dapat memasukan produk pangan berupa ikan segar dan produk olahan ikan sebagai salah satu bahan pokok penting yang dapat diakses oleh masyarakat penerima melalui e-warung. Ini sudah kami kordinasikan bersama Menteri Sosial, tinggal dihitung bagaimana nanti pembagiannya. Namun, kalau dalam kesempatan ini kalau boleh Pimpinan dan seluruh Anggota untuk bisa dikuatkan melalui Komisi di DPR RI.

Yang B, Gubernur, Bupati, Wali Kota kiranya dapat memasukan produk-produk perikanan atau ikan segar dan olahan ikan dalam program-program perlindungan sosial dan masyarakat yang dilaksanakan melalui APBD. C. para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, pemasar dan petambak garam yang masuk dalam kriteria masyarakat miskin dan pelaku UMKM. Dan bidang kelautan dan perikanan dapat menjadi keluarga penerima manfaat KPN dari program keluarga harapan PKH dan bantuan program non tunai PPNT. D. pembelian ikan hasil tangkapan nelayan dan pembudidaya ikan dan produk UKM Perikanan yang tidak terserap pasar oleh Pemerintah maupun BUMN dalam rangka membantu keberlanjutan usaha.

E. Penundaan kenaikan biaya logistik ikan terutama bea cargo melalui udara untuk ekspor dan penambahan maskapai yang melayani kargo perikanan. F. para pelaku usaha unit pengolahan ikan atau UPI untuk tetap melakukan aktifitas pengolahan melalui penyerapan bahan baku ikan atau udang dari para nelayan dan pembudidaya ikan dengan tetap menerapkan *good manufacturing practices* dan standar sanitation operasional prosedur, serta



menambahkan data stok ikan di cold storage dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional.

G. gabungan pengusaha makanan ternak untuk mempertimbangkan penundaan kenaikan harga pakan ikan dan udang agar kegiatan perikanan budidaya dapat berjalan secara berkelanjutan. Untuk yang point G ini Pemerintah sudah memberikan stimulus, program stimulusnya namun dalam pelaksanaan dilapangan Bapak Ketua, sama para pelaku usaha kami mendapat laporan harga-harga bahan pakan ini sudah mulai naik.

A. Optimalisasi penerapan sistem resi gudang ikan berkordinasi dengan Baperti, Kemendag, Koperasi, BUMN dan perbankan atau BLU LPUKM sebagai penyangga hasil perikanan ditingkat nelayan dan pembudidaya ikan. Dua, menjaga produktifitas unit pengolahan ikan dalam menyerap produksi nelayan dan pembudidaya ikan, pembudidaya KKP juga telah mengusulkan stimulus ekonomi bagi industri pengolahan ikan, antara lain insentif fiskal, yaitu terkait pengurangan PPH Pasal 25 sebesar 30% selama 6 bulan. B. Insentif ekspor atau pengurangan larangan atau pembatasan. C. insentif pinjaman berbunga lunak atau tanpa bunga bagi unit pengolahan ikan.

Tiga, untuk mendorong peningkatan ekspor ikan hidup ke Asia Timur khusus ke Hongkong diusulkan penggunaan pesawat Garuda Indonesia Boing 777 yang akan dipergunakan sebagai bantuan peralatan kesehatan untuk penanganan COVID di China untuk dapat membawa ikan hidup dari Indonesia khususnya dari Denpasar-Bali.

Empat, KKP mendukung pelaksanaan program kartu pra kerja melalui pemberian pelatihan kepada masyarakat. KKP mengusulkan dukungan program kartu pra kerja kepada Kementerian Tenaga Kerja sebanyak 32.010 orang untuk dilatih di 252 pusat pelatihan mandiri kelautan dan perikanan P2NKP.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Selanjutnya dalam kesempatan Rapat Kerja ini, kami melaporkan kegiatan yang telah KKP lakukan untuk percepatan penanganan COVID, antara lain yang pertama KKP telah meminta diberikan akses bagi kelancaran pengiriman logistic input produksi dan hasil supply produksi dibidang kelautan dan perikanan. Kedua, Badan Layanan Usaha Lembaga Penguatan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, memberikan kemudahan restrukturisasi pinjaman terkait pembayaran angsuran pokok dana tau bunga pinjaman margin bagi hasil jika ada usaha nasabah berdampak kejadian COVID-19. Kemudian ini dilakukan atas penilaian dan persetujuan tenaga pendamping LPUMKP.

Ketiga, menerbitkan surat edaran tentang pelayanan ke syahbandara antara lain melalui pemberian diskresi menerbitkan surat persetujuan berlayar sebatas pemeriksaan dokumen tidak memeriksa fisik atau tidak memeriksa fisik kapal. Penambahan masa berlaku SPB untuk kapal lebih kecil dari 30 GT, penerapan SPB on call untuk kapal lebih besar dari 30 GT.

Keempat, KKP telah memberikan pelayanan perijinan usaha kepada pelaku usaha sector kelautan dan perikanan. Kelima, melaksanakan bulan bakti nelayan dengan target 31 pelabuhan perikanan pusat, Perimpis, UPTD, 10 ribu kapal nelayan, 100 unit pengolahan ikan, 100 tempat pelelangan ikan, pangkalan pendaratan ikan di 34 provinsi dan 100 ribu nelayan dan ABK kapal dengan kegiatan, antara lain:

- a. Pembagian APD, masker dan hand sanitaser kepada petugas dan nelayan.
- b. Menyediakan sarana cuci tangan sebelum masuk area pelabuhan atau area pelayanan pelabuhan perikanan.
- c. Pengecekan kesehatan, suhu tubuh dikawasan pelabuhan perikanan.
- d. Pelaksanaan protocol COVID-19.
- e. Penyediaan pojok pendanaan bagi nelayan dan lain-lain.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Sebelum kami akhiri, kami juga ingin melaporkan bahwa semasa COVID ini ada anggota kami yang terpaksa harus mendahului kita 3 orang dari Dirjen PSDKP ada 2 orang, yaitu eselon III. Kemudian dari Dirjen PDS ada 1 orang dari eselon IV. Dan yang sekarang sedang dalam pengawasan masuk rumah sakit karena waktu itu mengikuti temannya mengantar ke rumah sakit ada. *Alhamdulillah* Bapak Ketua, ternyata menurut laporan yang terakhir mereka semua sudah dinyatakan sembuh. Ini kejadiannya tidak di kantor ini Bapak Ketua, kejadiannya pada saat mereka mengunjungi melaksanakan tugas daerah ke Semarang, saat KKP melakukan Rakor di Bandung mereka dapat penugasan ke Semarang. Dan semua yang kena tidak di kantor ini Pak Ketua, namun demikian kami dalam menghindari itu semua pada saat dapat instruksi dari Presiden sudah kami lakukan pembatasan untuk kerja ke kantor, terutama para pegawai kita yang menggunakan kendaraan umum dan ibu-ibu hamil. Dan ibu-ibu yang sudah melahirkan kita wajibkan untuk kerja dari rumah. Sehingga kita ini fleksible termasuk nanti eselon I yang juga mungkin merasa tidak sehat tidak perlu untuk datang ke kantor. Tidak ada kewajiban utama untuk datang ke kantor, tapi kewajiban kami tetap melakukan pelayanan, melakukan tugas kami.

Jadi kalau Bapak Ketua melihat kami ada kelapangan bukan karena kami untuk melawan Pemerintah atau melawan atasan kami, tapi kami hanya ingin membangun konteks semangat sehingga ritme semangat kerja kita tetap terjaga, produksi kita tetap terjaga. Semangat untuk menceah COVID adalah tugas kita bersama, semangat untuk segera sama-sama menyelesaikan masalah ini adalah tugas kita bersama. Tapi tugas kami juga tetap utama, yaitu menjaga produktifitas di sector budidaya maupun tangkap, karena bagaimana pun juga besarnya nanti dampak yang akan terjadi tetap saja semua akan perlu makan dan perlu ikan.

Bapak Ketua, demikian beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan rapat kali. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi IV DPR RI yang sangat besar kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan selama ini. Dan mohon persetujuan lebih lanjut terhadap program kerja ekonomi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan usulan stimulus dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Seluruh saran, masukan dan rekomendasi dari Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami sangat berharap Bapak Ketua manakala nanti ada yang ingin diusulkan atau ditambahkan dari Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI kami sangat terbuka untuk menerima usulan-usulan itu.

Terima kasih.

*Billahit taufiq walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat pagi,  
Salam sejahtera bagi semua,  
Om santi-santi om,  
Namo budaya,  
Salam kebajikan.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Menteri.

Dan Bapak Menteri perlu ketahui secara langsung dilapangan bahwa terjadi penurunan ekspor ikan ke semua negara. Jadi minta tolong salah satu Dirjen mengecek langsung karena para pelaku sudah mulai pusing. Produksi tetap berjalan sementara ekspor kepada negara-negara Eropa, Amerika maupun Cina semuanya hampir menurun tajam. Ini harus dipikirkan bagaimana nanti produksinya ada, tetapi ekspornya tidak ada, dikarenakan beberapa negara hari ini pun impor dari Singapura, negara Singapura sudah lock down, warga negaranya sudah tidak boleh keluar rumah.

Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Sebelum tanggapan atau pertanyaan dari Anggota, saya perkenalkan dua Anggota baru, dua-duanya wanita cantik. Yang pertama, Ibu Julie Sutrisno Nomor Anggota A-385 dari Fraksi Nasdem, Dapilnya NTT I, silakan Ibu sudah terlihat belum Ibu Julie.

**F-NasDem (JULIE SUTRISNO LAISKODAT):**

Sudah.

**KETUA RAPAT:**

Tolong perkenalkan diri Ibu.

Silakan Ibu.

**F-NasDem (JULIE SUTRISNO LAISKODAT):**

Baik, nama saya Julie Sutrisno Laiskodak dari Nusa Tenggara Timur. Saya PAW menggantikan Bapak Jhonny Plate dan saya ini baru pertama kali di DPR RI. Kemarin menjabat sebagai Ketua PKK Nusa Tenggara Timur.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu.

Yang kedua, Ibu Maria Lestari Nomor Anggota A-241 dari Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat.

Silakan.

**F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd.):**

Selamat pagi Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Pagi.

**F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd.):**

Perkenalkan nama saya Maria Lestari dari Kalbar I, saya dari Fraksi PDI Perjuangan. Pertama kali saya di Komisi X DPR RI sekarang di Komisi IV DPR RI. Saya ucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota pada pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan virus corona ini cepat berlalu.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Yang pertama mengajukan pertanyaan, yaitu Bapak Pimpinan Bapak Dedi Mulyadi silakan. Singkat, jelas Pak, jangan pakai foto-foto langsung jalan tol.

Terima kasih.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (DEDI MULYADI, S.H.):**

Iya, siap.

Bapak Menteri yang saya hormati,  
Bapak Ketua, para Wakil Ketua, para Anggota.

Satu hal saja, fokus saya adalah apa kebijakan yang akan diberikan untuk para nelayan ketersediaan bahan pokok mereka, terutama adalah para

buruh nelayan. Terus kemudian yang kedua, barangkali Kementerian Kelautan dan Pertanian bisa barter. Kementerian Pertanian ini beras untuk para nelayan, Kementerian Kelautan kirim ikan untuk para buruh tani. Dua komponen masyarakat yang paling terkena dampaknya yang harus mendapat perhatian.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Ketua.  
Selanjutnya Bapak Ketua Daniel Johan, silakan.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):**

Terima kasih Bapak Ketua.

Pimpinan, segenap Anggota dan Bapak Menteri dan seluruh jajaran.

Ada beberapa point yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah Bapak Menteri, ini sudah bulan April dan sampai sekarang belum ada satu Permen pun yang Bapak Menteri keluarkan, yang sebenarnya sangat mendesak seluruh lapisan stake holder sedang menunggu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan banyak terobosan-terobosan yang sempat Bapak Menteri sampaikan dapat segera diwujudkan.

Nah, yang kedua adalah kami mohon meskipun tadi Bapak Menteri sudah menyampaikan kebijakan untuk memudahkan para nelayan untuk melaut, tetapi di banyak tempat masih terjadi pelarangan dan penangkapan. Jadi di tengah situasi wabah corona yang memberikan dampak ekonomi yang menyulitkan masyarakat kami minta Bapak Menteri, memastikan seluruh jajaran KKP agar memberikan kemudahan dan tidak dilakukan penangkapan terhadap nelayan-nelayan yang sedang melaut. Saya mohon jaminan ini bisa dijalankan.

Yang ketiga adalah Komisi IV DPR RI harusnya sangat mendukung apa yang Bapak Menteri sampaikan agar salah satu program darurat yang bisa dilakukan oleh Kementerian bahkan dapat dukungan dari Pemerintah adalah ikut membantu membeli hasil-hasil produk nelayan kecil yang saat ini terdampak dengan situasi. Dengan kesiapan cold storage, program pembelian langsung oleh Pemerintah itu tentu sangat membantu. Yang pertama akan mengerakkan sector mikro di tingkat desa, di tingkat nelayan, di tingkat masyarakat kecil dan ini akan membantu perekonomian tidak terhenti.

Nah, yang terakhir mungkin Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah itu bisa minimal melakukan dua program, program darurat yang pertama adalah tentu kami Komisi IV DPR RI bersama KKP akan siap ikut mendistribusikan masker, karena saat ini masker menjadi salah satu program utama dalam mencegah COVID. Masker yang akan kita bagikan kepada seluruh stake holder perikanan, baik itu nelayan khususnya di pasar-pasar perikanan baik pedagang maupun pembeli itu kita pastikan selalu menggunakan masker. Saya rasa itu anggarannya tidak terlalu besar. Yang kedua, seandainya program

pembelian produk perikanan nelayan itu dilakukan, tentu Komisi IV DPR RI siap bersama-sama KKP untuk ikut membantu mendistribusikan bagi masyarakat kecil yang saat ini tidak punya pilihan bahkan untuk membeli makan mereka tidak sanggup. Mungkin beberapa hal itu penting yang menjadi catatan kami.

Terima kasih.

Selamat pagi.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Daniel dari Fraksi PKB.

Selanjutnya dari Fraksi PKS, Bapak Slamet silakan Pak. Bukan Slamet Bebek, ini Slamet Sukabumi.

Silakan.

Pak Slamet, kalau Bapak Slamet belum siap.

**F-PKS (drh. SLAMET):**

Terima kasih Bapak Ketua serta Pimpinan yang lain.

Rekan-rekan Anggota yang saya hormati,  
Bapak Menteri beserta seluruh jajaran eselon I yang juga saya hormati.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Sebelum kebeberapa penajaman Pak Ketua, mengingatkan saja hari ini 6 April kalau tidak salah ini adalah hari nelayan sehingga kepada Menteri KKP di hari nelayan ini kita sampaikan selamat hari nelayan untuk seluruh nelayan di Indonesia. Harapan saya tentunya Pemerintah dalam hal ini KKP bisa membuat nelayan kita dan generasi penerusnya bangga dengan profesi sebagai nelayan. Sekaligus bagaimana kemudian diupayakan profesi nelayan ini menjadi profesi terhormat di Indonesia. Itu harapan kita untuk kemudian menyongsong hati nelayan Indonesia.

Ada beberapa pertanyaan terkait dengan yang disampaikan Bapak Menteri. Yang pertama terkait dengan perluasan sasaran penerimaan program gemar ikan Bapak Menteri, itu saya lihat nampaknya hanya focus Jakarta sementara hari ini COVID sudah hampir di seluruh Indonesia sehingga khususnya juga kita Anggota Komisi IV DPR RI, Dapil-Dapil kita hampir semua terdampak dengan COVID ini, sehingga ini perluasannya nampaknya tidak bisa di Jakarta saja.

Yang berikutnya terkait dengan intervensi APBN, di halaman 3 itu disebutkan disitu sasarannya adalah PKH dengan tambahan 40.000 per KK per bulan. Yang saya tahu ini Bapak Menteri dan juga jajaran disana, bahwa PKH itu justru yang terdampak dari COVID-19 ini justru sebagian besar bukan

penerima dari PKH sejak awal. Sehingga kalau kemudian intervensi APBN ini masuk kembali kepada PKH, pertanyaan saya apakah ini justru kemudian tidak menumpuk pada sasaran atau bahasanya adalah salah sasaran, karena yang terdampak dengan COVID-19 ini justru sebagian besar adalah non penerima PKH itu. Nah, ini mohon nanti dijelaskan dan kalau saran saya justru jangan sampai ke sasaran yang sudah jelas yang bulanannya sebenarnya justru aman sebenarnya PKH itu aman. Yang tidak penerima PKH itu yang kemudian tidak aman.

Berikutnya terkait dengan stimulus ekonomi itu tertulis e-warung. Mungkin saya bisa ingin mendapatkan gambaran yang bagaimana e-warung pada pelaksanaannya nanti itu terkait denganantisipasi dari wabah COVID ini. Juga paket stimulus disitu dicantumkan bagaimana kemudian akan menahan GPMT (Gabungan Pengusaha Makan Ternak) untuk bisa tidak naik. Saya ingin mendapatkan gambaran langkah-langkah Pemerintah, karena jumlah juga terus naik sementara bahan baku sebagian besar dari produk pakan ternak kita adalah impor. Nah, intervensi apa yang akan dilakukan ini sekaligus yang saya lihat stimulus inikan sasarannya masuk kepada para pengusaha semuanya. Saya belum melihat bagaimana intervensi ini kemudian masuk langsung kepada nelayan atau petani barang atau yang terkait dengan KKP. Nah, ini mohon kemudian dijelaskan.

Dan terakhir Pak Menteri, itu juga ditulis bagaimana kemudian memanfaatkan Garuda untuk kemudian melakukan ekspor ikan ketika kemudian Garuda itu mengambil bantuan peralatan kesehatan. Pertanyaan saya seberapa seringnya interval intensitas pesawat ini mengambil bantuan itu. Sehingga ini menjadi program kementerian untuk kemudian menjadi alat angkut untuk ekspor ikan. Itu saja mungkin Pimpinan, beberapa hal yang ingin kami dalam.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Slamet.

Selanjutnya dari Fraksi Nasdem Pimpinan saya Bapak Hasan Aminuddin.

Silakan Bapak Hasan

Pak Hasan, silakan Bapak Hasan Pimpinan.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Selamat pagi,  
*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Sudah terdengar Pak Ketua?

Bapak Ketua, Pimpinan dan Anggota, Bapak Menteri KKP dan segenap pejabat eselon.

Yang pertama saya mengusulkan Pak Menteri, agar supaya relokasi itu pada semua Eselon I, sehingga tidak hanya sebatas Rp300 miliar saya menghendaki bunyinya triliun. Tentunya tidak mengganggu gaji para pejabat dan seluruh aparat KKP. Karena berbicara rakyat di Republik ini mayoritas yang pertama bercocok tanam dan yang kedua nelayan. Bagaimana mengamankan nelayan tentunya saya butuh pembantu Presiden ini ada sinkronisasi. Jadi Presiden Jokowi yang saya muliakan, itu A menterinya saya berharap A tidak B, C, D, sehingga rakyat hari ini bingung terutama Bupati, Walikota seluruh Republik Indonesia ini tidak satu kesatuan dan tidak satu komando.

Usul saya segera Bapak Menteri KKP bukan hanya dengan Kemensos, saya sependapat dengan Kang Dedi tadi bukan hanya Kemensos, saya menambah dengan Bulog, Kemensos dan Kementan. Lakukan Rakor sinkronisasi dan segera buat surat, layangkan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Republik Indonesia agar supaya Bupati, Walikota dan Gubernur itu membuat sebuah kebijakan ada dasar, dasarnya adalah Permen atau Kemenkeu. Menko Maritim ini saya berharap segera melakukan aksi, tidak mengurus yang bukan pekerjaannya.

Yang saya usulkan bantuan pangan non tunai, ini agar supaya nominalnya ada ketegasan. Saya bukan pada retorika, saya mencoba di kampung saya itu bantuan non tunai ini memasukkan hasil tangkap ikan. Luar biasa antusias masyarakat daripada mohon maaf makan ikan selain dari tangkap ikan yang lebih segar rakyat lebih antusias memakannya apalagi 20 hari lagi saya mengingatkan kepada semua yang hadir pemangku kebijakan ini bulan suci Ramadhan. Hari ini sudah mulai rakyat butuh sembako, sudah mulai pada antri, contohnya di Jakarta sudah ada mulai ada begitu ada Bansos yang disubsidi hari ini sudah mulai apalagi di kampung hari ini.

Sekali lagi Bapak Menteri, segera lakukan sinkronisasi untuk membuat satu keputusan. Bapak Presiden perintah, Bapak Menteri terkait ini sebagaimana sebagaimana saya sampaikan Kemensos, Kementan, KKP dan Bulog bersama-sama membuat sebuah keputusan. Sisiran anggaran itu untuk Bansos bukan untuk yang lain. Manakala ingin contoh ya buat sample di Dapil masing-masing Anggota Komisi IV DPR RI.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Ketua yang mewakili Fraksi Nasdem.

Selanjutnya Bapak Muslim yang mewakili Fraksi Demokrat.  
Silakan.



**F-PD (MUSLIM, S.H.I., M.M.):**

Terima kasih Bapak Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bapak Ketua, Wakil Ketua, Bapak Menteri beserta jajaran.

Pertama, tentu saya memberikan apresiasi buat Bapak Menteri dalam rangka relokasi anggaran kurang lebih sekitar Rp300 miliar. Memang tadi saya sepakat bahwa relokasi anggaran ini yang saya lihat ini baru hingga Eselon I. Tentu kita harapkan tolong Bapak Menteri sisir lagi mana-mana nanti Eselon-Eselon yang memungkinkan disisir sehingga anggaran yang Rp300 miliar ini bisa terus bertambah, sehingga penggunaan dana untuk COVID-19 ini betul-betul tepat sasaran dan juga kita harapkan ini betul-betul dampaknya sangat dirasakan khususnya tani maupun nelayan yang bergerak di bidang perikanan.

Yang kedua Bapak Menteri, kita berharap nanti ada rincian yang disiapkan oleh Bapak Menteri ini menyangkut relokasi anggaran ini dari mana saja diambil dan kemana saja, sehingga kita tahu betul ketika program-program mana yang direlokasi anggaran sehingga betul-betul dampaknya kepada masyarakat.

Kemudian yang ketiga Pak Menteri, hari ini yang sangat dirasakan masyarakat adalah petani dan nelayan yang betul-betul dibawah. Seperti apa program Bapak Menteri dalam konteks seperti ini kita harapkan ada yang langsung mereka menerimanya, apakah bentuk program sosial kemudian sembako. Terus terang hari ini kalau kita lihat dari paparan Bapak Menteri, ekspor kita sangat bahkan hampir negara-negara tujuan utama ekspor ini semua lagi lockdown termasuk sebagian Amerika, Cina dan beberapa negara Eropa lain. Ini tentu ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bapak Menteri, sehingga produk nelayan kita atau produk hasil tangkap ini hari demi hari sekarang sudah 50% jatuh harganya ini seperti apakah, apakah cold storage yang di daerah ini bisa segera dipulihkan, bisa dikelola dengan baik, jadi sehingga hasil tangkapan nelayan ini tidak harga jatuh yang luar biasa yang akhirnya tetap nelayan yang sangat dirugikan.

Mungkin ini Pimpinan beberapa hal sementara yang bisa saya sampaikan. Tentu harapan kita juga ada program COVID juga ini kita minta masalah masker Bapak Menteri, silakan kita dari teman-teman Dapil ini pendistribusian masker juga bisa dimanfaatkan ini. Kenapa? Karena di Dapil kita ini sangat banyak nelayan maupun petani sehingga karena penularan terbesar daripada distancing tadi. Kita harapkan juga Komisi IV DPR RI khususnya teman-teman di Dapil bisa dimaksimalkan perannya untuk terjun langsung kepada nelayan maupun petani di bidang perikanan di daerah.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Muslim.

Selanjutnya Bapak Rudi dari Fraksi PAN silakan.

**F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bapak Menteri selamat pagi beserta jajarannya dan saudara-saudara sekalian.

Pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu tadi saya sangat mendukung dan sangat bagus sekali. Yang paling penting itu semua ... dan tentu kami-kami di Dapil Bapak Menteri menunggu realisasi yang sangat cepat daripada alokasi anggaran tersebut. Sehingga bisa kami distribusikan kepada para nelayan-nelayan di kampung dan mereka dapat merasakan bagaimana justru dari dampak COVID-19 ini tidak bermasalah dari mereka. Oleh karenanya ini yang perlu saya sampaikan khususnya di daerah pemilihan saya di Nusa Tenggara Barat I Pulau Sumbawa.

Saya kira itu saja Pak Menteri, sekali lagi saya dan tentu teman-teman sekalian menunggu realisasi alokasi tersebut, sehingga dapat didistribusikan kepada para nelayan.

Terima kasih Bapak Menteri.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Rudi.

Selanjutnya mewakili Gerindra Ibu Endang, singkat dan jelas Ibu.

**F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):**

Baik, terima kasih Bapak Ketua atas ijin Bapak Budi ini.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ketua dan teman-teman yang saya hormati,  
Dan Bapak Menteri khususnya yang saya hormati beserta jajarannya.

Pada prinsipnya kami sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh teman-teman khususnya tentang gemar ikan. Jadi gemar ikan itu mohon diperbanyak untuk Dapil-Dapil karena banyak sekali para nelayan khususnya yang menunggu bantuan dari kita semua.

Yang kedua, dan kita tidak akan mengumpulkan masa akan tetapi akan menyampaikan ikan-ikan tersebut kepada masyarakat dengan door to door. Yang kedua, memberikan subsidi atau bantuan pakan, benih dan obat bagi pembudidaya ikan. Kemudian yang ketiga, memberikan subsidi atau bantuan BBM yang tadi Bapak Menteri ungkapkan belum kita realisasikan kepada masyarakat dan ditunggu oleh masyarakat.

Kemudian ada lagi realokasi yang lebih penting, yaitu mengenai pengadaan-pengadaan Bapak Menteri, karena biasanya system lelang itu memerlukan waktu yang panjang. Nah, sekarang sudah terhenti karena adanya virus ini, mohon dialokasikan kepada pengadaan untuk Bansos-Bansos. Yang kelima, kerja sama antara lintas kementerian tadi sudah diungkapkan oleh beberapa teman bagaimana supaya ada kordinasi yang baik khususnya dengan e-warung dengan took-toko tani. Dan kalau bisa di semua Dapil kita itu diperoleh fasilitas tersebut.

Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah sarung tangan Pak Menteri, tadi tidak disebutkan padahal selain masker sarung tangan ini diperlukan sekali dan sekarang susah diperoleh di masyarakat.

Terima kasih.

*Wabillahit taufiq walhidayah,*

Dan saya salut Bapak Menteri sudah memperhatikan teman-teman kita yang sudah meninggal dari jajarannya.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Endang.

Selanjutnya yang mewakili PPP ada?

Kalau PPP tidak ada, siapa?

Tadikan PKB sudah Bapak Daniel Johan, kan kita pakai putaran pertama dan putaran kedua dulu. Yang mewakili PPP tidak ada?

**F-PPP (EMA UMIYYATUL CHUSNAH):**

Ema Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Ibu.

**F-PPP (EMA UMIYYATUL CHUSNAH):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bapak Menteri KKP beserta jajarannya,  
Bapak Pimpinan beserta Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Langsung saja saya sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak-Bapak semua dari Komisi IV DPR RI. Dan saya juga mendukung terkait dengan alokasi dana untuk penanganan COVID-19. Yang ingin saya tambahkan untuk tambahan dari dana KKP untuk kemarutan atau pun apa Rp40.000 per KK tidak hanya disalurkan melalui PKH atau BTNP tetapi dengan melalui Bansos masyarakat yang terdampak selain dari program itu juga lebih banyak. Untuk itu, kami mohon juga diperhatikan masyarakat terdampak terkait dengan PKL, para pemudik juga perlu diperhatikan yang hari ini pedagang-pedagang kaki lima tidak bisa bekerja juga perlu perhatian dari Pemerintah khususnya dari KKP.

Terima kasih, itu Bapak Pimpinan yang bisa saya sampaikan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu.

Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan Bapak Hansi Lema silakan.

Singkat dan jelas.

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Terima kasih Bapak Ketua.

Pimpinan yang terhormat,  
Dan salam hormat buat Bapak Menteri dan jajarannya.

Yang pertama saya ingin katakana secara prinsip kami setuju stimulus ekonomi dan juga insentif yang disampaikan dalam halaman 16 dan 19 itu sudah cukup komprehensif. Yang kami tegaskan adalah bahwa stimulus ekonomi dan insentif khusus itu harus didasarkan kepada data yang akurat dan valid. Sehingga kemudian alokasi anggaran yang sebesar Rp300 miliar itu bisa dijelaskan siapa yang menjadi penerimanya. Karena itu, saya ingin melihat kira-kira data ini dimiliki oleh KKP atau tidak. Kalau misalnya belum mungkin bisa mengumpulkan data dari pihak Pemerintah Daerah dan juga berkerja sama dengan mengundang asosiasi-asosiasi untuk mengimpun data ini.

Yang kedua Bapak Menteri, dengan kebijakan pembatasan sosial dalam bentuk sosial physical distancing ini akan berdampak kepada interaksi pasar-pasar tradisional. Penjual dan pembeli, konsumen itu akan berpindah kepada pasar-pasar online. Karena itu, mungkin yang belum saya lihat adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan mungkin perlu melakukan digitalisasi

pasar ikan, sehingga kemudian aktifitas jual beli dari produsen, dari nelayan, dari penjual dan konsumen ini bisa tetap dilakukan.

Yang ketiga soal pakan, kita tahu bahwa ada beberapa hal yang mengakibatkan keluhan dari masyarakat terkait dengan pakan yang digunakan untuk perikanan budidaya. Kita tahu bahwa masih ada distribusi yang kurang merata dan juga harga yang tinggi sebagai akibat dari depresiasi Rupiah. Karena itu, kita ingin melihat satu program yang konkrit dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini sehingga kemudian bisa memastikan supply pakan ini sampai kepada para petambak, sampai kepada mereka yang bergerak di bidang perikanan budidaya dan kemudian bisa mendapatkan akses untuk itu.

Yang terakhir, kemarin saya menerima video dari nelayan-nelayan di Kota Kupang Pak. Nelayan-nelayan itu menguburkan ikan karena memang tidak lagi memiliki pasar. Nah, ini perlu jugaantisipasi mungkin perlu juga lebih khusus stimulus ekspor ikan dibuka walaupun mungkin beberapa negara itu ada yang lock down, tetapi saya kira distribusi baik untuk pasar domestic maupun pasar internasional ini harus dilakukan.

Saya kira itu beberapa point menyangkut validasi data, menyangkut digitalisasi pasar ikan, menyangkut kepastian pakan buat para petambak dan juga tadi adalah...

**KETUA RAPAT:**

Cukup Pak Ansy Lema.

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Ya, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Tidak perlu diulang-ulang lagi.

Selanjutnya putaran kedua Bapak Johan Rosihan dari Fraksi PKS.

Silakan Bapak Johan.

**F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bapak Ketua, Bapak Menteri serta teman-teman yang saya hormati.

Pertama, di halaman 2 dalam rangka antisipatif yang diajukan oleh Bapak Menteri itu ada mendata semua hasil produksi, mendata ini dan itu. Saya sarankan jangan lupa mendata kondisi nelayan kita hari ini yang terdampak

COVID, agar ketika kita memberikan stimulus tidak salah sasaran. Jadi jangan hanya produksinya akan tetapi kondisi nelayan kita hari ini harus didata, itu yang pertama.

Yang kedua, dalam program bulan bakti perikanan, ada program lawan corona dengan makan ikan. Saran saya mari kita laksanakan secara serempak di semua Dapil dengan program gemar makan ikan yang berbasis Anggota itu Bapak Ketua. Nah, anggarannya dikurangi anggaran operasionalnya karena kita tidak perlu mengumpulkan orang. Kita ganti dengan beras, sehingga isi goodie bag bukan hanya hasil ikan dan olahannya tetapi juga ada beras mungkin ditambah masker. Itu nanti kita antar dari rumah ke rumah, itu yang kedua.

Yang ketiga, dari sisi anggaran Bapak Ketua di halaman 2. Saya melihat KKP hanya berpihak kepada perikanan budidaya saja dengan tambahan anggaran Rp300 miliar. Padahal nilai produksi ikan tangkap pada triwulan I jauh lebih rendah dibandingkan 2018, sehingga perlu juga support anggaran. Demikian juga tentang peningkatan nilai produksi perikanan kita sehingga tidak ada lagi ikan yang tidak bisa diserap pasar dan sebagainya.

Dan yang terakhir, saya sudah share di group Komisi kemarin itu bahwa NTB itu tidak bisa ekspor ikan. Jadi Bapak Menteri, jangan hanya meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan APBD-nya untuk itu tetapi mungkin juga Kementerian bisa mengambil alih dalam kondisi COVID ini untuk membantu Pemerintah Daerah melakukan ekspor.

Terima kasih Bapak Ketua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Selanjutnya Mbak Luluk.

Teman-teman Anggota yang saya hormati, mohon kalau bisa singkat, jelas karena kan kita ada Tatib yang membatasi rapat ini.

Mbak Luluk silakan.

**F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si., M.P.A.):**

Terima kasih.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Bapak Ketua.

Hermanto Bapak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Bapak Hermanto baca groupnya, di group Komisi IV DPR RI dibaca.

Ya Mbak Luluk silakan.

**F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si., M.P.A.):**

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Menteri dan semua jajarannya, Bapak dan Ibu semua yang saya hormati.

Saya pada dasarnya juga sepekat apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain juga mendukung apa yang sudah direncanakan oleh Bapak Menteri terkait dengan realokasi anggaran. Tetapi saya juga ingin memberikan dukungan bahwa tolong untuk bisa digunakan saluran KBRI kita Bapak, pasti ada informasi pasar yang pasti membutuhkan juga ikan dari Indonesia. Beberapa negara mungkin kondisi pasarnya susah untuk ditembus tetapi negara-negara yang lain saya yakin bahwa mereka justru khawatir kalau pasokan pangan mereka ataupun ikan itu tidak bisa mereka penuhi karena satu kondisi tertentu. Nah, saya kira ini bagian dimana Indonesia selalu bisa mendapatkan peluang dari situasi-situasi yang ada. Termasuk yang tadi disampaikan di pasar Amerika.

Kemudian yang kedua, terkait dengan insentif ataupun tentang stimulus. Saya pada dasarnya juga setuju bahwa nelayan itu bukan hanya tangkap tetapi juga budidaya. Nah, sekarang ini selain ada pandemik COVID Bapak Menteri, kita juga dihadapkan pada situasi dimana Dolar itu naiknya luar biasa tinggi, sementara 70% dari produksi budidaya perikanan itu pakannya inikan sebagian besarnya impor. Nah, kalau sudah pakannya impor dengan kondisi harga yang sangat mahal karena Dolarnya juga sangat tinggi, maka ini yang harus perlu dipertimbangkan.

Satu yang terkait dengan subsidi jangka pendek karena ini terkait dengan COVID, tetapi juga strategi jangka panjang jangan dilupakan. Bukankah ini juga satu momentum kita untuk konsolidasi lagi bekal para nelayan kita ini kemampuan untuk bisa memproduksi pangan, kasih alat-alatnya karena itu yang mereka butuhkan. Saya beberapa kali ketemu dengan mereka juga sebenarnya kalau mereka dikasih alatnya pengetahuannya, maka mereka juga bisa memproduksi bukan hanya cukup mereka sendiri tetapi juga bisa memenuhi mungkin kebutuhan dari kelompok-kelompok yang lain.

Nah, yang ketiga saya mendukung yang tadi sudah disampaikan Bansos langsung. Soal sembako mungkin kita tidak akan menambah apa yang sudah dilakukan oleh juga kementerian yang lain tetapi justru kelompok-kelompok warga lain yang tidak menjadi bagian dari PKH, KPM itu jumlahnya jauh lebih banyak. Pagi tadi saja nyuwun sewu Pak Menteri, saya di WA beberapa ustad, kebayang tidak ustad yang sehari-hari hidupnya mereka itu dari memberikan pengajian yang jumlahnya kecil, pelayanan, doa dan sebagainya mereka

terdampak dan tidak bisa melakukan itu dan hidupnya juga pasti sangat terganggu. Nah, yang kayak begini ini diurus oleh siapa.

Nah, saya kira itu saja Bapak Menteri dan Pimpinan yang terhormat, terima kasih kami mendukung apa yang disampaikan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Mbak Luluk.

Selanjutnya Pak Suhardi Duka, silakan Pak.

Pak Suhardi, kalau Bapak Suhardi belum bisa Pak Ibnu Multazam. Sudah Pak Suhardi, bisa?

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Sudah.

**KETUA RAPAT:**

Lanjut, singkat.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bapak Menteri yang saya hormati,  
Bapak Ketua yang saya hormati.

Persoalan nelayan kita sesungguhnya bukan terlalu pada dampak COVID, bukan kepada COVIDnya. Tetapi dampaknya dimana nelayan ini produksinya ada tapi pasarnya tutup, sehingga dengan demikian apa yang diidentifikasi oleh Bapak Menteri sudah sependapat dengan kita dimana kita ingin supaya hasil produksi tangkap nelayan itu bisa dikembali ke pasar. Dengan demikian, kebijakan stimulus Bapak Menteri perlu kita dukung utamanya perluasan untuk pasar. Yang kedua adalah perluasan untuk gemar makan ikan, kepada rumah sakit, kepada Ojol. Tetapi yang penting juga adalah perluasan untuk lingkungan-lingkungan perkotaan yang terdampak akibat ketidak mampuan untuk membeli ikan. Dengan demikian, kita perluas mungkin paket-paket kecil sampai 20 juta per lingkungan ataupun kalau bisa ya tidak cukup dananya 10 juta per lingkungan. Dengan demikian, lingkungan kita yang terdampak daripada COVID ini bisa merasakan makan ikan.

Yang kedua adalah agar ikan ini bisa diproduksi, bisa awet maka kita berikan stimulus kepada Ibu-Ibu nelayan untuk bisa mengelola ikannya. Apakah itu dikelola dalam bentuk abon dan lain sebagainya ataupun bisa juga ikan dikelola untuk menjadi makanan ternak. Dengan demikian, yang dibutuhkan mereka adalah alat pengolahan sederhana. Dengan demikian, ikan ini bisa



bertahan karena tidak semua daerah, tidak semua wilayah dan nelayan memiliki cold storage. Saya kira ini yang menjadi pertimbangan kita.

Dan yang terakhir adalah refocusing hanya Rp300 miliar saya kira ada proyek-proyek fisik yang saat ini belum terlalu mendesak katakanlah pelabuhan dan lain sebagainya bisa direfocusing untuk menambah yang Rp300 miliar itu menjadi sampai dengan Rp500-600 miliar. Dengan demikian, perluasan stimulus bisa lebih luas, jangan hanya Rp300 miliar. Demikian juga untuk kegiatan pengawasan laut dan pengamanan laut saya kira juga bisa kita ambil sebagian. Dengan demikian, bisa menambah yang Rp300 miliar yang lebih khusus oleh Bapak Menteri bisa menjadi sampai dengan Rp600 miliar bisa menjadi bagian daripada stimulus yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak COVID.

Saya kira demikian Ketua.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Suhardi.  
Selanjutnya Bapak Ibnu Multazam.

**F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan yang saya hormati,  
Para Anggota Bapak dan Ibu yang saya hormati,  
Bapak Menteri beserta segenap jajaran yang saya hormati.

Saya mendukung apa yang disampaikan Bapak Suhardi Duka kaitannya dengan refocusing anggaran ini mohon disisir kembali khususnya proyek-proyek yang belum dilelang dan mungkin masih bisa ditunda untuk anggaran tahun depan itu mohon untuk ditambahkan kepada refocusing. Kaitannya dengan penggunaan refocusing yang sementara ini difokuskan kepada perikanan budidaya. Saya usul untuk bioflok itu diperbanyak, diperbantukan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan. Sehingga bioflok itu volumenya akan bisa diperkecil mungkin 2 kolam atau 3 kolam sehingga akan menambah banyak penerima yang kehilangan pekerjaan untuk menerima bioflok, karena bioflok ini panennya cepat 3 bulan, kalau lele itukan 3 bulan. Jadi kalau 3 bulan itukan dampak daripada COVID-19 inikan pasti belum selesai. Untuk itu, saya minta diperbanyak bioflok.

Yang kedua, saya setuju kepada teman-teman bahwa safety net itu tidak hanya diberikan kepada keluarga PKH, karena keluarga PKH ini dari beberapa kementerian sudah membantu. Untuk itu, diberikan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan akibat PHK, pulang kampung dan lain sebagainya,

nelayan yang tidak bisa melaut dan lain sebagainya untuk bisa mendapatkan stimulus dari Kementerian KKP.

Saya kira itu Ketua.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Selanjutnya Bapak Fauzi Amro, siap-siap Bapak Hermanto.

**F-NasDem (FAUZI H. AMRO, M.Si.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bapak Ketua Bapak Suding, Wakil Ketua dan para Anggota yang saya hormati, Bapak Menteri, Bapak Sekjen yang hormati dan saya banggakan.

Pertama, saya mengapresiasi kepada Bapak Menteri Bapak Edhy Prabowo yang telah pertama melepas ekspor di saat musim corona ini berjumlah 3200 ton dengan nilai hampir Rp200 miliar, itu saya apresiasi. Apresiasi yang kedua, Bapak Edhy Prabowo mengusulkan insentif fiskal untuk pengusaha perikanan itu kepada pajak. Yang ketiga, dalam rapat refocusing anggaran Kementerian KKP ini yang pertama Bapak Menteri, Bapak Ketua, saya anggaran Rp6,47 triliun itu kan hanya Rp300 miliar yang difocusing. Rp300 miliar itu menurut saya Bapak Edhy masih kecil Pak, karena akan berdampak kepada sekitar 4-6 bulan persoalan virus corona ini. Mungkin dari masing-masing Dirjen bisa disisir, Dirjen mana yang bisa diambil dalam konteks untuk penanganan COVID-19.

Yang keempat, dalam persoalan COVID-19 ini atau corona yang berdampak ini pada ekspor dan budidaya. Saya hanya mengingatkan kepada Kementerian KKP bahwa lebih focus kepada ekspor dan budidaya, itu yang paling penting karena mengingat dampak para nelayan yang disampaikan oleh kawan-kawan sebelumnya tadi itu memang luar biasa dampaknya. Saya mengingatkan kepada Menteri KKP bekerjalah sesuai dengan Tupoksinya, itu yang pertama. Yang kedua, tolong berkoordinasi dengan Kementerian lain, Kementerian-Kementerian lain supaya KKP, KLHK, Kementerian Pertanian lebih focus kepada Tupoksinya masing-masing. Nah, itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan Bapak Ketua.

Sekali lagi saya mengingatkan anggaran KKP karena kita bicara refocusing hari ini yang jumlahnya Rp6,4 triliun kurang lebih minimal 10% lah Bapak Menteri itu difokuskan ... (rekaman terputus).

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

... untuk kita. Apalagi kita ini nanti menghadapi dua keadaan yang bersamaan yang sulit kita kendalikan, yaitu COVID-19 ini akan berlangsung kurang lebih 3 bulan lagi. Kemudian dalam kebersamaan kita juga menghadapi lebaran, kebutuhan akan pangan itu adalah sangat melonjak dari keadaan yang sekarang, sementara aktifitas ekonomi masyarakat itu mengalami tingkat produktifitas yang menurun. Oleh karena itu, kita sangat mendukung stimulus program yang dilakukan oleh Kementerian KKP, tapi masalahnya dananya darimana stimulus itu. Kalau dananya dari KKP saja itu menurut saya tidak cukup. Oleh karena itu Bapak Menteri, itu minta tambahan dananya dari dana yang kita minta tunda program-program yang infrastruktur itu.

Nah, saya sangat mendukung program-program yang terkait dengan soal masyarakat yang diluar PKH yang dimana masyarakat ini adalah pekerja harian. Harian ini kerjanya dia sangat tergantung kepada kondisi COVID sekarang ini, COVID sekarang ini orang tidak boleh keluar, sementara dia penghasilannya harian. Oleh karena itu, gemar makan ikan ini adalah....

**KETUA RAPAT:**

Pak Hermanto kalau bisa focus pada pembicaraan refocusing dan realokasi, kalau masalah penambahan dana itu nanti biar Menteri bicara dulu kepada Presiden dan Kementerian Keuangan.

Terima kasih.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Itukan terkait juga dengan penguatan refocusing kita Pak Ketua, nanti jangan hanya mengandalkan dana KKP saja yang sudah kita anggarkan ini. Karena stimulus tadi Bapak Menteri ini perlu dana yang besar ini, karena berapa point yang saya lihat itukan perlu anggaran besar. Oleh karena itu, kalau kita hanya menutup lubang gali lubang ini ada dampaknya pada perbaikan ekonomi nelayan kita.

Oleh karena itu, kita minta ada anggaran tambahan dari luar yang normal ini, supaya ada pemberdayaan dari Menteri KKP ini. Nah, jadi yang saya kehendaki itu adalah supaya anggaran yang ada ini kita focus untuk pangan, karena pangan ini jauh lebih penting daripada....

**KETUA RAPAT:**

Cukup Pak Hermanto?

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Yang lainnya karena ini adalah untuk kesehatan dan untuk daya tahan body kita. Jadi konsumsi yang sehat....

**KETUA RAPAT:**

Cukup Pak Hermanto, Pak Hermanto cukup.

Selanjutnya Bapak Firman Soebagyo.

Silakan Bapak Firman, kalau Bapak Firman belum ada Bapak Sutrisno.

Silakan Bapak Sutrisno, focus Pak, singkat.

**F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):**

Terima kasih Pak Ketua.

Karena suruh focus langsung saja ini Pak Ketua, terhadap relokasi anggaran. Di belanja pendukung manajemen itu ada anggaran Rp500 miliar lebih, Pak Menteri hanya mengambil 1% itu sekitar Rp5 miliar. Dengan adanya COVID corona aktifitas tentunya penggunaan anggaran itu terbatas, karena tidak bisa kumpul-kumpul orang. Oleh karena itu, anggaran pendukung pun juga harus dikurangi. Menurut hemat saya minimal 50% anggaran pendukung manajemen itu juga bisa dikurangi, yaitu sekitar Rp250 miliar. Belum lagi Pak Menteri di mohon untuk mengevaluasi program-program kegiatan yang tidak mungkin dijalankan karena aktifitas sangat terbatas, sehingga sebelum kita meminta kepada Menteri Keuangan bagaimana mengefisiensikan anggaran yang ada.

Kemudian yang kedua, kita lagi diuji ini Pak Menteri, Kementerian KKP tiap tahun menganggarkan di Ditjen Penguatan Daya Saing. Tadi dilaporkan produksi meningkat, tapi pasar sulit. Oleh karena itu, ada dua yang perlu ditempuh bagaimana pasar dalam negeri, bagaimana memanfaatkan bantuan kendaraan pendingin, gudang beku dan lain sebagainya dimanfaatkan untuk menyiapkan pasokan. Membentuk kru untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat yang tidak mampu, apa itu BPNT, apa itu PKH, atau juga masyarakat yang memang sedang dikonsinyer karena corona.

Kemudian ini kesempatan bagi para nelayan, para pengusaha ikan dengan melemahnya Rupiah tentunya namakala kita bisa melakukan ekspor ini pendapatan pengusaha perikanan kita akan .... Oleh karena itu, saran saya adalah bagaimana memaksimalkan agar produksi yang dilaporkan meningkat ini bisa memenuhi kebutuhan yang mendesak untuk mengangkat para nelayan agar hidupnya juga bisa baik, disisi lain juga bisa meningkatkan ekspor.

Kemudian di Dirjen Perikanan Tangkap ada program peningkatan diversifikasi para nelayan. Ini kesempatan saya kira anggaran untuk diperluas, agar nelayan-nelayan yang tidak bisa melaut itu bisa mengembangkan aktifitasnya lainnya.

Terima kasih Bapak Menteri dan Bapak Ketua.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Sehubungan Bapak Ketua lagi ke toilet, selanjutnya Bapak Slamet silakan, Slamet Bebek ini.

**F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Selamat siang.

Pimpinan, Anggota dan Bapak Menteri KKP yang saya hormati.

Yang pertama, saya menyimak apa yang disampaikan teman-teman saya sepakat. Melihat di Dirjen Pengolahan Perikanan Tangkap disini ada beberapa pembinaan kegiatan terutama pengolahan pelabuhan dan sebagainya juga ada GSL dan juga ada tentang rehabilitas di pelabuhan sebesar Rp76 miliar. Dengan harapan hal ini dari beberapa anggaran yang tidak terlalu penting untuk difocusing terkait dengan adanya penanganan COVID-19 ini. Prinsipnya kami untuk dijadikan kepada Bansos, karena pada prinsipnya kami Anggota DPR RI hari ini perlu untuk bersama dengan masyarakat dan untuk membantu penanganan terkait masalah COVID-19 ini.

Yang kedua, terkait masalah ekspor ikan saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Menteri KKP dari 32 ton yang diekspor ke 13 negara. Akan tetapi yang ingin saya tekankan untuk tidak menafikkan ataupun tidak untuk melihat sisi lain dari adanya terdampak covid-19 ini untuk diberikan bantuan Bansos ikan. Seperti misalkan pesantren-pesantren hari ini perlu kiranya uluran tangan kita untuk bisa menopang gizi mereka bisa melayani tentang COVID-19 ini.

Ketiga, terkait dengan masalah Bansos, PKH, dan BPNT yang hari ini yang akan diadakan intervensi APBN kalau boleh saya sarankan kepada Menteri KKP, saya usulkan lebih baik dijadikan Bansos secara mandiri dari KKP. Apa manfaat dan gunanya, yang saya inginkan ada andil dari Anggota Komisi IV DPR RI khususnya di Dapil, baik secara pengawasan ataupun pendistribusiannya.

Dan yang keempat, terkait dengan masalah gemar ikan yang awalnya Rp100 juta per fisik yang saya inginkan hari ini mungkin bisa didistribusikan. Misalkan hari ini bisa dirubah skalanya per fisik Rp20 juta barangkali untuk bisa turun ke bawah memberikan Bansos tersebut....

**KETUA RAPAT:**

Agak singkat sedikit Bapak Slamet.

**F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):**

Berbentuk ikan ataupun Bansos lainnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.

Sekian dan terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya Ibu Julie Sutrisno silakan.

**F-NasDem (JULIE SUTRISNO LAISKODAT):**

Baik, terima kasih.

Saya juga sebagai sekarang adalah Ketua PKK yang juga Ketua Gemar Makan Ikan. Jadi menurut saya Bansos jangan semuanya itu melalui PKH tetapi juga bisa melalui Ketua-ketua PKK sampai Dasawisma, karena kami mempunyai kader sampai Dasawisma dan Bansos tersebut bisa melibatkan kami untuk bisa didistribusikan. Saya rasa itu usulan dari saya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Julie.

Selanjutnya Ibu Kiki silakan.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Selamat siang kepada senior-senior dan teman-teman.

Bapak Menteri, saya ingin memastikan bahwa pada dasarnya Komisi IV DPR RI dari tadi saya sampaikan terkait saya dengar merealokasi dan refocusing ini adalah hal yang urgent. Nah, apabila saya hasil saya melihat pada bahan rapat tanggal 25 Februari contohnya itu ada biaya yang mohon dikoreksi apabila saya salah mengkalkulasi halaman 19 itu ada beberapa program yang saya rasa itu tidak mungkin bahkan sulit untuk dijalankan dalam kondisi COVID hari ini. Contohnya, layanan pengelolaan hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri, kemudian layanan pengelolaan model usaha kelautan dan perikanan, dan rata-rata disini di halaman 19 itu adalah anggaran terkait dengan perjalanan dinas dan lain-lain yang kurang lebih angkanya Rp440 miliaran. Jadi saya mohon apabila memungkinkan memang program-program ini...

**KETUA RAPAT:**

Ibu Kiki kurangi volume.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Jadi kesimpulannya semoga KKP bisa melakukan eksekusi terhadap realokasi difocusing ini kepada program-program yang konkrit dengan menunda program-program yang terkait perjalanan dinas atau perjalanan luar negeri dan bahkan infrastruktur yang mungkin masih tertunda dan belum mungkin dilakukan pada saat ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh teman-teman intinya bagaimana ada satu crash program yang bisa mensupport masyarakat menghadapi COVID-19 ini. Dan bukan hanya nelayan ada juga pertambak garam dan lain-lain yang mungkin harus kita pikirkan.

Sekian dari saya Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Mbak Kiki.

Selanjutnya Bapak Firman Soebagyo, jadi ngomong Bapak Firman?

Kalau Bapak Firman berarti ada lagi Anggota, cukup?

**F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):**

Saya Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Tarom, singkat.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Kita tetap ke Bansos, inikan persoalannya kan....

**KETUA RAPAT:**

Tolong jangan ikut dulu ngomong kasih dulu Mbak Tarom, kan kita gentian ngomongnya nanti.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Jadi kita minta ada tambahan dari Rp6,4 triliun itu.

**F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):**

Mohon maaf Bapak Herman, gantian Pak Herman, saya sedikit saja Pak Herman.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang terhormat Ketua, Pimpinan dan para Anggota,

Dan yang saya hormati Bapak Menteri KKP dan seluruh jajaran.

Langsung saja saya pada dasarnya sependapat seperti teman-teman atau rekan-rekan terdahulu, yaitu adanya penambahan realokasi dari Rp300 miliar. Kalau total anggaran Rp6,4 triliun seperti yang disampaikan teman terdahulu adalah minimal 10%, karena banyak kegiatan yang dimungkinkan tidak bisa dilaksanakan dengan kondisi yang seperti ini.

Kemudian yang kedua, yaitu ada percepatan realisasi program baik itu yang regular maupun yang aspirasi. Buat saya ruang politiknya adalah aspirasi gitu saja. Karena ini juga langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, ini sangat juga ada fungsi sosialnya disana, sangat membantu masyarakat terkait dengan keadaan ini.

Kemudian tidak bermaksud keluar dari konteks, KKP ini mendapatkan tugas baru kaitannya dengan Rp405 triliun atau tidak. Kalau memang mendapatkan tambahan tugas tentang terkait dengan itu, itu juga sangat membantu kepentingan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat khususnya dari mitra dari Komisi IV DPR RI.

Terima kasih Ketua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Mbah Tarom.

Demikian pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI. Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan jawabannya. Tadi sudah jelas Bapak Menteri, teman-teman menginginkan beberapa program yang bisa kita pending, bisa kita pindahkan dulu. Di samping tadi apakah Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan tugas dari Pemerintah masalah dana yang Rp405 triliun itu.

Silakan Bapak Menteri.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Baik, terima kasih Bapak Ketua.

Ketua, Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Sekali lagi terima kasih atas dukungan dan semangatnya kepada kami dalam kondisi yang serba terbatas tapi Bapak dan Ibu sekalian, tetap terus membina kami dan mendukung kami.

Yang pertama dari Bapak Dedi Mulyadi, tadi Bapak Sudin juga menyampaikan, betul Bapak Sudin bahwa beberapa negara, seluruh negara sebagian besar itu lock down, namun dalam berita terbaru masih banyak



negara-negara yang sudah akan mengevaluasi. Tapi lock down yang dimaksud adalah lock down orang, tapi barang akan terus berdatangan, tetap akan lewat, boleh masuk. Tapi ini tetap menjadi kajian kami, kalau Singapura menjadi salah satu data dan kami akan juga komunikasikan dengan negara-negara lain.

Yang kedua Bapak Dedi Mulyadi, terima kasih atas masukan saya pikir usulannya luar biasa. KKP dan Pertanian untuk barter, saya pikir ini salah satu bagian kerja kami untuk berkordinasi dengan Kementerian lainnya akan kami tindak lanjuti. Sementara kordinasi kami baru melakukan kordinasi dengan beberapa kementerian yang berhubungan langsung dengan sector kecil, yaitu UKM karena berurusan dengan pelaku usaha kecil dan menengah. Kemudian dengan Menteri Sosial, karena ada beberapa program yang kita akan minta bagian kalau bisa semua yang kita produksi bisa di masukkan dalam program BPNT dan program keluarga sejahtera.

Bapak Daniel Johan, tentang Permen. Permen secara prinsip sudah melalui Ratas dan sudah disetujui oleh Bapak Presiden untuk ditindaklanjuti hanya saja ini hanya masalah teknis, karena bagaimana pun juga Bapak Presiden kan perlu detail di dalam hal ini detail itu dilakukan oleh Sekab. Pembahasan sekarang hanya sifatnya redaksional dan beberapa langkah, mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini sudah selesai. Insya Allah ini semua sudah dalam jalan.

Kemudian masalah perijinan, memang ada beberapa kendala lapangan yang kami. Maksud kami kendala adalah nelayan-nelayan yang kita temukan dilapangan ada kendala-kendala, yaitu mereka ada menyalahi aturan. Kita tangkap tetap tapi tetap haya untuk pemberitahuan, yang jelas sesuai petunjuk Bapak Presiden tidak ada lagi dalam kondisi seperti ini kita malah mempersulit, jadi kita mempermudah. Saya pikir ini kesempatan untuk nelayan-nelayan kita yang mungkin saat ini masih ada sedikit kendala tentang aturan atau melanggar sedikit, kami bisa berikan toleransi Bapak Ketua.

Hanya saja kalau yang asing kami tetap akan melakukan tindakan tegas. Beberapa hari yang lalu kami baru menangkap dua kapal lagi di Natuna, memang daerah ini menjadi salah satu pusat. Namun demikian, kami juga tetap mengawasi di perbatasan-perbatasan lainnya. Biasanya kalau ada kapal-kapal asing itu saya kira langsung ketahuan Pak dan Ibu sekalian. Sehingga ada yang nelayan-nelayan complain karena ada yang ditangkap, memang benar ada yang ditangkap tapi tidak kami proses hukum, kami berikan pembinaan. Ada beberapa nelayan juga yang sempat kami proses karena membawa BBM ke tengah lain padahal tidak ada ketentuan untuk membawa BBM. Inipun dalam proses kami bentuk arahan-arahan tidak dalam penindakan atau melakukan pidana.

Pak Slamet, terima kasih atas ucapan hari nelayan, tapi mohon disampaikan ini masih ada dalam masalah hari nelayan ini masih ada dua versi yang akan segera dibahas tanggalnya, karena ada dua masukan dari ANSI dan dari MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara). Dan saya pikir ini bukan masalah yang luar biasa, hanya masalah perlu kordinasi. Bagi kami di tanggal mana saja yang penting disepakati kami tetap akan ikut. Dan kalau bisa jangan ada dua

hari nelayan, hari ini versi ini maunya kita satukan visi menjadi satu. Tapi untuk hari ini kami ucapkan terima kasih, kami juga merasa senang kalau memang ada hari nelayan berarti ada sesuatu pegangan bagi kita bahwa nelayan itu menjadi hal yang paling penting.

e-warung dan GPMT saya pikir ini memang kewenangannya dalam beberapa rapat dengan Presiden sudah pembagian wewenangnya kan sudah ada, jadi urusan-urusan yang seperti ini Bansos dan sebagainya sudah ada Kementerian. Namun, kami sifatnya backup dan kami akan terus berusaha untuk selalu berkordinasi. Dan kami akan mengoptimalkan apa yang ada pada kami dan sebanyak-banyaknya bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat di bawah, masyarakat nelayan, masyarakat pembudidaya dan petambak ini akan kami laksanakan. Mengenai anggaran tadi sudah kami sampaikan bahwa anggaran yang ada memang cuma Rp300 miliar tapi dalam anggaran masing-masing Dirjen kami sudah melakukan untuk sementara refocusing. Makanya tadi saya lihat ada beberapa masukan kalau ada peningkatan-peningkatan kami mohon waktu untuk melakukan assessment sehingga secepatnya begitu nanti memang harus antar Dirjen untuk melakukan refocusing kami mohon persetujuan dari Bapak Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Namun, kami mohon waktu tidak begitu lama sehingga mungkin Bapak Ketua Sudin kalau nanti memang benar hitungannya harus refocusing antar kedirjenan kami mungkin perlu mohon waktu untuk Rapat Kerja sekali lagi. Sebagai misal di tempat kami yang memang sudah ada nomenklaturnya, yaitu melalui penguatan daya saing. Bisa juga melakukan pembelian dan sekaligus penyaluran berupa gemar makan ikan.

Ini sudah kami bahas dari awal bersama teman-teman untuk melibatkan teman-teman Komisi IV DPR RI kami sangat senang, karena memang teman-teman Komisi IV DPR RI lah yang mempunyai jaringan. Termasuk sekaligus pendelegasian APD-APD yang ada untuk masyarakat di Dapil Bapak dan Ibu sekalian. Hanya saja kami juga sedang mengakses supaya tidak tumpang tindih, karena perintah Bapak Presiden jangan sampai tumpang tindih dan dikhawatirkan mubazir ini. Ini sementara Bapak Slamet.

e-warung itu adalah salah satu langkah...

#### **KETUA RAPAT:**

Bapak Menteri, sedikit Pak Menteri saya sampaikan Bapak Menteri, saya rasa kalau APD tidak mungkin tumpang tindih, karena apa? Saat ini hampir semua tempat, wilayah, beberapa wilayah di Indonesia yang saya tahu keluhannya itu masalah APD. Itu saja Bapak Menteri.

#### **MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Siap Pak, terima kasih Pak.

Jadi ini kami juga sedang mencari cara-cara untuk bisa mengumpulkan APD. Semalam beberapa teman-teman pengusaha datang untuk juga salah satunya mohon kalau bisa KKP menjadi salah satu salurannya, karena mereka

juga mengalami kesulitan untuk mendistribusikan. Kami tantang kala ada berapa siap kami salurkan. Dari Karantina juga mendapat bantuan dari Cina, Ibu Rina sejauhmana sekarang? APD dari Karantinanya Cina ada 50.000.

**KEPALA BADAN KARANTINA IKAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Dr. Ir. RINA, M.Si.):**

350 Pak, yang 50.000 masker.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Ya 50.000 masker dan 350 APD (Alat Pelindung Diri). Nah, yang masker ini nanti kalau memang benar sudah bisa ditangan kami, kami juga akan laporkan pada Bapak dan Ibu sekalian. Semalam ada temannya Bapak Sudin juga saya yakin karena beliau sangat dekat, Bapak Alex Bapak Sudin beliau menawarkan, beliau siap untuk menyerahkan, karena beliau juga mengalami kesulitan dalam pendistribusian. Bapak Sudin kenal Bapak Alex kan, Bapak Alex semalam ketemu untuk minta kalau bisa dilewatkan KKP, sudah tidak ada masalah karena mereka juga baru dari beberapa minggu baru semalam katanya baru bisa dapat pesawat untuk sampai ke Jakarta dari Hongkong.

Mudah-mudahan ini bisa, kalau ini bisa berarti saya akan mohon bantuan teman-teman Bapak dan Ibu Komisi IV DPR RI untuk bisa menyalurkan. Sehingga APD saja saya pikir tidak cukup, karena yang paling penting masker dan sebagainya dalam rangka mendukung menjaga jarak secara umum di public juga yang paling tidak kalah penting adalah penguatan daya tahan tubuh. Makanya mungkin di dalam program gemar makan ikan ini kami sedang menghitung ulang secara rinci supaya tidak menyalahi aturan, juga menjadi salah satu sarana kita dalam rangka membagi. Konsep membaginya saya pikir tidak perlu kumpul Bapak dan Ibu saya yakin punya tim suksesnya masing-masing.

**F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):**

Interupsi Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Tunggu dulu Bapak Multazam.

Bapak Menteri jelaskan dulu selesai baru interupsi.

Terima kasih.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Bagaimana Bapak Ketua?

**KETUA RAPAT:**

Lanjutkan Pak Menteri, baru nanti interupsi Bapak Multazam.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Baik, terima kasih Bapak Ketua.

Masalah yang Garuda Indonesia itu salah satu usulan kami karena masalah utama kami pada saat mengeksport ikan hidup dari beberapa wilayah Indonesia untuk dikirim kepada Hongkong adalah kesulitan pesawat. Itu salah satu bahan yang kami usulkan dalam Rapat Koordinasi dengan Menko Perekonomian untuk minta bantuan kepada semua Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan. Saya pikir Garuda itu salah satu kebetulan Garuda digunakan untuk menggunakan pengambilan alat-alat APD dan sebagainya. Daripada kesana kosong dimanfaatkan, tapi ini dalam taraf sedang dikordinasikan sejauhmana bisa atau tidaknya. Sebenarnya intinya bukan hanya Garuda itu, semua penerbangan yang ada di Indonesia yang bisa dioptimalkan untuk mengangkut hasil-hasil produk perikanan ke Hongkong dan Cina ini bisa dilakukan.

Yang keempat Bapak Hasan Aminuddin, terima kasih atas dukungan relokasi kami sedang menanti juga sedang menghitung ulang dalam waktu singkat dan kami manakala nanti harus antar kedirjenan kami akan tetap perlu untuk Rapat Kerja lagi untuk segera memutuskan, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Nah, kerja sama dengan Bulog, Kemensos dan Kementan juga sudah kami lelang. Nanti seandainya tadi program beli ikan yang kita belikan kepada pembudidaya maupun penangkap ikan itu nanti juga pelakunya bukan dari KKP. Kita akan menggunakan BUMN yang sekarang ini selain Bulog juga RNI maupun BUMN Perikanan lainnya juga yang seperti Perindo dan Perinus. Cuma kemarin Pemerintah beberapa kali menyebut tentang RBI, Bulog juga sebenarnya tidak masalah. Sementara untuk rantai dingin kami sudah punya data sekarang ini total semua data yang masuk di Jawa Timur, DKI, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Banten, kapasitas rantai dinginnya itu ada 1.438.430 ton yang terisi stok ikan sebanyak 714.249. Sehingga ada cadangan stok hampir 725.000. Nah, inipun data baru data kasar yang kami terima berdasarkan laporan-laporan tinggal nanti kami lihat dan sebarannya. Sehingga nanti manakala nanti ada kebijakan untuk membeli produk-produk ikan kita sementara menunggu pasar mulai hidup kembali kita sudah siap untuk menyimpan ikan. Siapa pun yang akan beli stok yang akan beli ikan nelayan kita tetap dia akan butuh cold storage. Sementara ini cold storage yang tersedia hampir 725.000 di 6 provinsi yang kami data ini, sementara provinsi lain masih banyak belum termasuk Sulawesi Utara.

Kemudian Bapak Hasan yang lain BPNT ini sedang kami matangkan, BPNT ini kami hanya menasar tambahan uang Pemerintah kepada masyarakat individu yang sebanyak 10 juta KK itu. Kalau ini bisa dioptimalkan itu ada sekitar Rp400 miliar setahun dan kalau ini bisa diisi setengahnya saja untuk ikan itu ada Rp200 miliar setiap bulan, mohon maaf itu bukan setiap bulan untuk bisa menyerap produk ikan kita. Dan ini secara prinsip Menteri Sosial,

kebetulan teman dekat Bapak Ketua sangat mendukung dan sedang kami assess, tinggal pilihanya apakah ikan segar atau ikan kaleng. Kalau saya mintanya kalau bisa semua yang mempunyai potensi untuk bisa kita mudah bagikan. Saya tetap mengusulkan ikan segar, karena inilah yang paling sehat dan paling lebih memudahkan. Hanya saja tidak terlalu praktis, karena kalau seandainya nanti dibagi lama tidak ada sarana pendingin mudah untuk busuk. Kami sedang mengevaluasi bahkan mensimulasi rantai-rantai dingin, kemampuan rantai dingin kita sampai ke tingkat pasar, sampai ke tingkat rumah tangga ataupun pengumpul, mudah-mudahan bisa dengan ikan segar. Kemudian masalah sisiran anggaran kami sedang lakukan Pak Hasan.

Kemudian Pak Muslim, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas supportnya. Masalah program nelayan tadi sudah sebagian kami sampaikan, intinya kalau ada tambahan-tambahan yang diusulkan kami akan dengan senang hati untuk terus menerima. Masalah cold storage tadi sudah dijelaskan sudah kami data, sehingga mana yang tidak terpakai, mana yang tidak optimal akan kita optimalkan.

Bapak Rudi masalah realisasi mohon ditunggu nanti kami akan laksanakan. Ibu Endang, terima kasih masukannya, gemar ikan kami juga kemarin sempat melewati Dapil Ibu ke daerah Cidaun saya pikir Ibu perlu kesana lagi karena memang daerah Cidaun itu perlu sentuhan-sentuhan, daerah yang walaupun dekat dengan Jakarta agak susah untuk kesana harus 8 jam dari Jakarta. Mudah-mudahan Ibu Endang masih ada kesempatan, masih siap untuk datang ke Cidaun. Disana sangat berpotensi untuk budidaya tambak udang. Masalah BBM kami sedang menyurati kepada Menteri ESDM untuk permintaan-permintaan kami, baik BBM industry, maupun BBM subsidi. Bapak Dirjen PT suratnya kemarin saya minta untuk segera saya tandatangani. Sarung tangan dan sebagainya, lintas kementerian kerja samanya sedang kami tidak berhenti untuk terus berkordinasi.

Ibu Ema Ummiyatul, masalah alokasi dana yang di kita untuk Bansos tadi sudah kami sampaikan. Mungkin konsepnya namanya Bansos, tapi pengertian Bansos jangan sampai salah diartikan karena konsep Bansos ini sudah ada Kementerian yang menangani, tapi intinya adalah bagaimana kita bisa mem-back up program-program Bansos yang pernah ada dalam berupa program kita sendiri, yaitu yang ada di kita adalah program melalui PDS, yaitu gemar ikan.

Bapak Hansi Lema, paket stimulus ekonomi sudah kami jawab. Kemudian digitalisasi pasar ikan, kami sudah melakukan kerja sama dengan online system, yaitu Bukalapak dan kami sudah langsung menindaklanjuti sebelum corona ini ada melalui para pendamping, mohon maaf Bapak Ketua saya agak sedikit blank masalah ini. Ada pendamping-pendamping BLU Kami, kami kumpulkan di Jakarta beberapa bulan yang lalu. Melalui LPM UKP bekerja sama dengan starup juga dan Bukalapak, sehingga diharapkan sebenarnya mungkin walaupun belum massif tapi ini saya pikir sudah ada yang berjalan. Dan kita harapkan ini terus dan ini dengan masalah ini merupakan salah satu ujian, salah satu penguat kita untuk semakin meyakinkan bahwa digital pasar ikan akan segera terwujud dengan cepat.

Masalah pakan memang kita tahu distribusi pakan sangat terbatas, karena jumlahnya juga sangat kecil. Dan kita kedepan akan terus memperbanyak, makanya langkah pertama di tahun pertama kami ini bagaimana dari anggaran yang serba terbatas ini kita minta sebagai bentuk bahwa kita focus di budidaya. Dan ini sudah disepakati dalam semua jajaran kami untuk focus, bukan berarti yang lain tidak penting, tangkap kami harapkan di program selanjutnya akan menjadi salah satu program yang segera kita kejar. Karena potensi disini juga sangat besar banyak pelabuhan-pelabuhan yang masih perlu fasilitas-fasilitas tambahan yang ini dalam waktu dekat akan kita dorong. Ini saya yakin dan kami sangat yakin Ketua dan teman-teman yang lain juga berkeinginan bahwa pelabuhan-pelabuhan kita merupakan pelabuhan-pelabuhan nanti yang terlengkap di sector perikanan. Sehingga program yang sementara ini kita fokuskan di budidaya dalam rangka untuk membentuk model dulu, setelah model ini terbentuk maka akan terjadi pola. Dan pola inilah yang akan meyakinkan kita bahwa dengan pola ini berapapun yang akan kita tingkatkan sudah tidak perlu diragukan lagi terhadap kegagalan maupun ketidakberhasilan.

Masalah pakan ini juga kami sudah membangun model pakan yang dulu diusulkan oleh teman-teman Komisi IV DPR RI salah satunya yang dimotori oleh Bapak Mindo Sianipar, menggunakan pakan-pakan ikan non impor, yaitu menggunakan kearifan lokal seperti maggot, maggot dan sarana lainnya yang kita pergunakan. Kita di program ini juga di budidaya salah satu pergeseran Rp300 miliar itu digunakan selain membangun model-model pertambakan dan pembudidayaan melakukan bioflok dalam skala besar, kami juga membangun pusat pembangunan untuk pakan-pakan alternative selain pakan-pakan ikan yang konvensional.

Masalah Kupang, Walikota Kupang sudah mengirim utusan untuk berkordinasi dengan kami. Kami sebentar lagi setelah ini kami harapkan bisa tersambung dengan Walikota Kupang, karena beliau ingin berkonsultasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan.

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Terima kasih Bapak Menteri.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Terima kasih Pak Ansy.

Bapak Johan Rosihan, terima kasih kami juga sambil berjalan selain mendata semua yang akan kita panen, yang akan kita tangkap, hasil-hasil tangkap, hasil-hasil panen kami juga mendata semua permasalahan yang ada di kampung-kampung nelayan, sehingga itu sekaligus tidak perlu dua kali kegiatan.

Bulan bakti perikanan dan dana tambahan untuk tangkap tadi sudah saya sampaikan. Yang masalah tidak ekspor ikan mohon nanti datanya di daerah mana. Dan kami juga terus fungsinya kami untuk memfasilitasi

sekarang-sekarang ini yang tidak tersambung. Masalah bulan bakti perikanan ini juga kami akan mohon bantuan Bapak dan Ibu sekalian, bentuknya bagaimana nanti ikan-ikan ini bisa sampai ke rumah-rumah. Karena konsepnya saya yakin di antara semua elemen, di antara semua stake holder di Indonesia ini saya yakin yang paling siap adalah Anggota DPR RI. Kenapa? Bapak-bapak punya jaringan di DPRD Provinsi, Kabupaten Kota dan sampai ke tingkat anak-anak, sampai tingkat TPS. Jadi kalau untuk membagi ikan sampai rumah ini saya pikir yang paling baik. Ini sudah kami sampaikan melalui Menteri Sosial juga. Kalau perlu tambahan kekuatan sebenarnya DPR RI lah yang paling pas. Kenapa? Pada saat sekarang ini kita tidak bisa mengumpulkan orang jadi langkah yang paling benar adalah door to door. Bahwa nanti pembagiannya di isi nama Bapak dan Ibu, itu adalah hak Bapak dan Ibu semua dan saya yakin itu merupakan nilai tambah. Kenapa ikan? Karena sekaligus ini serapan langsung.

Percayalah Bapak dan Ibu sekalian, dari hasil data kami kalau kita menghitung dengan data yang sebelumnya panen ikan di Indonesia tadi dta awal 1,6 juta ton selama 3 bulan untuk panen ikan laut. Kemudian 344 ribu ton untuk panen ikan air tawar, 4.400 ton panen ikan air laut, panen ikan budidaya laut dan 104.000 ton untuk tambak udang. Kalau ini dijumlahkan kemudian dibagi merata ke seluruh Indonesia masih sangat kurang Bapak Ketua dan teman-teman semua. Jadi saya sangat optimis di industry ini, makanya kami tidak pernah ingin menghentikan, kami terus bahu membahu untuk terus tetap menggenjot. Saya tahu memang kendalanya adalah begitu produksi susah ini hanya masalah kendala rantai distribusinya. Ini yang sedang segera kita untuk lakukan mencari jalan keluarnya.

Kemudian paket-paket kecil, betul Bapak Suhardi. Kemudian alat pengolahan ini kami mohon saran yang seperti apa sehingga kami akan cari. Kalau Bapak Suhardi sudah punya usulan seperti apa sehingga kita bisa segera tidak perlu lagi untuk mencari tempat lain.

Pengamanan laut kami tetap lakukan, *Alhamdulillah* kami sudah menangkap tetap terus menangkap dan giat, karena memang agak ditakut-takuti karena kita akan membawa sebagai misal kemarin menangkap di Natuna Utara ada dua kapal yang kita tarik, setelah ditangkap kita akan bawa ke daerah Natuna tapi ditolak oleh Kepala Daerahnya. DPR RI dibawa ke Kalimantan Barat mohon ijin Bapak Daniel Johan kalau bisa Bapak Daniel Johan sampaikan kepada Bapak Gubernur untuk urusan penanganan ini manakala kita akan kembalikan ke armada tempat pangkalan kita harusnya tidak ada larangan, karena kita tidak membawa penumpang untuk didaratkan kepada masyarakat. Kita membawa penumpang awal kapal ini akan ditaruh dan ditempatkan di tahanan kita, jadi tidak akan ada sentuhan dengan masyarakat.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):**

Nanti saya akan perintah.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Terima kasih Pak.

Sementara ini mereka sedang kami taruh di Natuna, baru pagi ini selama 3 hari terkatung-katung di tengah laut baru pagi kami baru dapat jalan keluar. Ada 22 AKB dari Vietnam dengan kapal ada dua. Tadinya kita mau segera untuk mendaratkan karena di dalam kapal itu ada ikan-ikan yang mereka sudah berhasil tangkap. Dan harapan kami ikan-ikan inikan bisa kita gunakan untuk kita bagikan ke masyarakat, tapi saya mudah-mudahan tidak tahu apakah ikannya masih bisa digunakan karena sudah terlalu lama, tolong nanti dicek lagi Pak Heru. Mudah-mudahan masih bisa digunakan, menurut informasi ikannya sangat banyak hasil tangkapan mereka.

Kemudian refocusing untuk yang lain-lain saya yakin kita sama satu pemikiran, bahwa kami juga tidak akan memaksakan satu program yang tidak bisa kita kerjakan dalam kondisi sekarang ini, sehingga bisa kita akan gunakan untuk program-program yang dibolehkan untuk penguatan selama menghadapi COVID, termasuk tadi pembagian ikan.

Kemudian Pak Ibnu Multazam, mohon maaf tadi Bapak Ibnu, Bapak menyampaikan saya hanya bisa menangkap karena suara Bapak tadi putus disini. Mohon nanti ditambahkan yang kurang masalah bioflok, tentang safety net, dua hal yang saya tangkap yang lain saya belum tangkap karena tidak dengar suaranya. Jadi yang program bioflok memang kami akan perbesar bahkan dalam skala model tambak, tapi kita akan bagikan kepada masyarakat-masyarakat. Kalau tambak kan logikanya ini hanya orang-orang yang punya penghasilan kaya, orang kaya dalam arti orang yang punya uang yang lebih cukup mampu. Karena kalau bertambak, berbudi daya udang jumlah udang untuk satu tambak itu setidaknya-tidaknya harus punya modal 1-2 miliar untuk tambak udang 1 hektar. Nah, nanti kami akan bikin clusterisasi bagaimana 1 hektar ini bisa dibagi berapa KK, ini akan kami assessment menggunakan dana budidaya yang kemarin difocusing kan juga menggunakan dana BLU yang kita miliki. Mudah-mudahan ini bisa segera kita laksanakan di periode ini di tahun ini.

Masalah safety net juga terima kasih atas untuk membantu kehilangan pekerjaan. Bapak Ibnu mungkin ada tambahan yang sebelum ijin Bapak Ketua, tadi agak putus suaranya.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Bapak Ibnu Multazam.

**F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):**

Terima kasih Bapak Menteri.

Jadi safety net itukan tidak hanya kepada keluarga PKH, diharapkan dari KKP ini focus untuk mereka yang kehilangan pekerjaan untuk disumbangkan, dibantukan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan.



Yang kedua, saya tadi interupsi itu yang APD dan masker itu bantuan apa menggunakan pengadaan APBN. Kalau itu bantuan misalnya dari pengusaha saya harapkan tidak ada komitmen apa-apa murni bantuan.

Terima kasih Bapak Menteri.

**KETUA RAPAT:**

Silakan dijawab dulu Bapak Menteri, masalah Bapak Ibnu Multazam.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Ya, terima kasih Bapak Ketua.

Jadi intinya Bapak Ibnu kami tidak berapa kalau itu ada komitmen. Komitmen dia hanya sederhana ingin membantu menghidupkan karena mereka juga kebetulan ikut banyak kegiatan yang mereka lakukan dan mereka juga banyak mengalami keuntungan selama ini di Indonesia. Ini yang akan mereka tunjukkan membalas kembali apa yang mereka sudah dapat. Jadi bantuan alat-alat APK yang mereka tawarkan itu adalah gratis, bahkan tidak hanya itu mereka siap untuk ikut membeli ikan-ikan hasil produksi hanya butuh difasilitasi bagaimana ikan-ikan itu ada dimana termasuk akses cold storage.

Jadi Bapak Alex, Pak Sudin mereka siap untuk membantu itu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau Bapak Sudin ada waktu tolong diyakinkan lagi bahwa untuk bisa segera. Karena janji beliau semalam sangat eksplisit terbuka siap, hari ini beliau akan mengirim orang untuk ketemu kesini ke KKP untuk memetakan dimana-mana. Seperti udang dia siap beli udang bahkan dia sudah punya pasarnya termasuk hasil-hasil budidaya yang lainnya, termasuk hasil tangkap.

Untuk masalah safety net Pak Ibnu, itu tidak hanya kehilangan pekerjaan nanti terus kita bantu akan tetapi kita juga siapkan lapangan pekerjaan seandainya mereka juga mau melaut. Karena dari hasil yang kita pantau dilapangan dengan percepatan ijin yang kita berikan kepada mereka, kebanyakan sekarang para pengusaha ini kesulitan mencari ABK untuk menangkap ikan. Ada dua agenda yang akan kami lakukan, kami terus akan tetap mendata dari mana saja tenaga kerja ini yang akan bisa kita ambil.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Interupsi Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Pak Hermanto tunggu dulu sampai Bapak Menteri selesai baru interupsi.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Saya mau interupsi sedikit saja, satu kata saja.

Pak Ketua, saya interupsi satu kata saja.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Pak Ketua, bagaimana Bapak Ketua?

**KETUA RAPAT:**

Pak Menteri lanjutkan dulu, nanti baru Bapak Hermanto biar waktunya panjang.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Hanya satu kata Bapak Ketua, tidak banyak.

**KETUA RAPAT:**

Mau ngomong apa Bapak Hermanto.

Silakan Bapak Hermanto.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Saya ingin tanya saja, Bapak Alex itu siapa orangnya?

**KETUA RAPAT:**

Bapak Menteri dijawab Bapak Alex itu siapa?

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Pak Alex, saya juga baru kenal semalam. Tapi yang jelas dia komitmen mau bantu. Dia datang ke tempat saya hanya mau minta akses bisa membagikan APD. Dia sudah punya ratusan ribu APD yang dia sudah bagikan dan sekarang terakhir dia sulit untuk mendistribusikan. Berkordinasi sama BNPB katanya agak sedikit susah karena memang BNPB sendiri sibuk, makanya melibatkan kami. Ini melalui hubungan pertemanan Pak Ketua, jadi saya juga tidak kenal, tapi yang jelas niatnya baik tidak ada udang dibalik batu apa yang dia minta dari kita. Yang jelas dia mau membantu, namanya orang mau bantu akan saya layani. Jadi APD-APD-nya itu murni dari bantuan dari mereka bukan dari APBN kita. Bagi saya mana yang bisa kita manfaatkan akan kita manfaatkan. Di samping itu saya tawarkan untuk menawarkan barang-barang yang kita produksi, dan mereka sangat mau. Saya pikir itu Bapak Hermanto. Pak Sudin saya bisa lanjutkan?

**KETUA RAPAT:**

Pak Menteri, kalau bisa lanjutkan, singkat, jelas.

## **MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Baik, Bapak Fauzi Amro terima kasih atas dukungannya, *refocusing* kami segera laksanakan. Kemudian Bapak Hermanto terima kasih tadi dari Presiden memang belum ada arahan untuk menambah dana kepada Kementerian-Kementerian. Dana-dana penguatan stimulus itu sudah ada bidangnya masing-masing melalui Menko Perekonomian dan Menko Maritim dan Menko PMK.

Nah untuk kami, kami sifatnya di dua hal. Yang pertama focus kebijakan anggaran kami diberikan kekuatannya focus untuk melakukan penanganan terhadap COVID termasuk safety net. Jadi ini yang akan kita fokuskan. Untuk safety net kita sudah punya nomenklatur dengan penguatan daya saing melalui program gemar ikan. Ini yang akan kita optimalkan. Makanya nanti kalau ada usulan-usulan lain dari Komisi IV DPR RI kami siap tapi hanya saja kami mohon diberikan payung hukumnya sehingga kami bisa usulkan dan ini bisa kami assessment dengan Menteri Keuangan dan Bappenas, sehingga kami tidak menyalahi aturan. Secara prinsip Bapak Ketua, Bapak Sudin dan teman-teman kami siap apa yang bisa kami lakukan.

Bicara anggaran yang kami hanya Rp6,45 triliun ini kami rasa ini masih lebih dari cukup. Kalau saja ini kita optimalkan semua dan kita lakukan saya pun dengan bantuan teman-teman masih perlu bantuan tempat-tempat lain. Ini yang kami hitung karena kami masih sangat yakin dengan anggaran ini kami masih bisa Bapak Ketua.

Bapak Soetrisno terima kasih masukannya, kami segera tindaklanjuti. Bapak Slamet Ariyadi juga terima kasih kami segera kami tindaklanjuti. Ibu Julie terima kasih atas akses yang dilibatkan. Ibu Julie, mohon nanti yang di Kupang itu mohon dilihat permasalahannya apa sehingga kami bisa langsung menindaklanjuti karena itu kan Ibu penguasa NTT, kalau memang itu bisa kami berikan penguatan terhadap ikan-ikan yang dikubur itu masalahnya apa, segera kami akan lakukan langkah-langkah.

Mbak Riezky Aprilia, terima kasih dengan anggaran-anggaran yang tadi. Kami juga akan hitung ulang dan segera kami akan tindaklanjuti. Mbah Tarom, terima kasih juga masalah anggaran terserap, tapi kalau memang bisa ada eksplisit yang mana tapi dari gambaran ini kami sudah membaca. Sekali lagi manakala nanti ada yang harus kami minta persetujuan di dalam Rapat Kerja, kami mohon waktu untuk menghitung ulang. Kalau memang tidak perlu saya pikir berarti antar kedirjenan masing-masing tidak ada masalah. Tapi menurut saya Pak Sudin, masih perlu. Karena apa? Kalau kita akan memperkuat di dalam gemar ikan, berarti kalau hanya menggunakan dana PDS yang ada itu sangat tidak mungkin, sehingga perlu kami payung hukum untuk menggeser anggaran dari Kementerian yang lain, sedang kami hitung ulang.

Mbah Tarom tentang program Rp405 triliun itu kami secara eksplisit belum ada baru dalam penyerapan-penyerapan, pendataan-pendataan yang dilakukan oleh Menko Ekonomi kemarin kami sudah ajukan. Salah satu materi pengajuan kami adalah yang sebagian besar sudah kami presentasikan hari ini

dihadapan Bapak dan Ibu semua. Beberapa langkah-langkah termasuk ikut membeli dan ada dana dari talangan negara untuk bisa membeli produk-produk perikanan. Ini sudah menjadi poin kunci untuk ditindaklanjuti di Kemenko, tinggal kami menunggu dan kami terus berkordinasi dengan Kementerian-kementerian yang lain.

Bapak Ketua, dalam kondisi apapun kami sekarang tetap terus melakukan pelayanan-pelayanan kami, kami terima. Hanya saja mohon di-back up sama Bapak Ketua, manakala nanti ada yang complain kami kok tidak mengindahkan tolong sampaikan bahwa konsep di tempat kami berbeda di beberapa Kementerian, karena kami harus mempertahankan produktifitas Bapak Ketua. Sebagai misal perijinan, tidak ada perijinan yang tidak ada diurus orang dari rumah karena materinya ada di kantor, harus kelapangan, berarti ini tidak bisa kita gantikan dengan melalui video conference. Makanya kami terpaksa harus turun kelapangan hanya saja kami akan terus menjaga kaidah-kaidah terhadap yang diperintahkan keselamatan untuk penanggulangan COVID.

Demikian Bapak Ketua, sekali lagi terima kasih. Kami mohon waktunya, kami mohon dukungannya, kami mohon arahnya. Dan kami selalu siap dalam rangka mendengar semua harapan dan masukan dari Bapak Ketua dan Wakil Ketua, dan semua Anggota Komisi IV DPR RI.

Terima kasih.

Demikian dari saya.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah menyampaikan jawabannya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati Anggota Komisi IV DPR RI.

Dari dialog dan masukan sebelum acara ini kita akhiri, akan kami bacakan rancangan kesimpulan Rapat Kerja pada hari ini. Tolong Anggota bantu menyimak dan bantu melihat.

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020, sebagaimana anamat Inpres Nomor 4 Tahun 2020 untuk memenuhi ketersediaan pangan nasional.

Bapak Menteri bagaimana?

#### **MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Mohon ijin sebentar Pak, konsultasi sama Irjen saya biar tidak salah dari etikanya Pak, boleh ya Pak, sebentar saja Pak.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Anggota setuju pak, point satu.

**KETUA RAPAT:**

Pak Menteri, ini hanya belum ada detail loh.

**F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):**

Untuk menambah dana refocusing, kan tadi Bapak Menteri menyampaikan dalam pidatonya itu dia berkenan untuk menambah refocusing tidak hanya Rp300 miliar.

**KETUA RAPAT:**

Itu nanti Bapak Multazam, nanti dilihat di nomor 2.

Pak Menteri setuju?

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Terima kasih Bapak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Pak Menteri, setuju?

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Setuju Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT: SETUJU)**

2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan peningkatan anggaran pada program Bansos atau bantuan Pemerintah kepada masyarakat terutama nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengelola pemasaran hasil perikanan yang terkena dampak COVID-19, sebesar kurang lebih Rp600 miliar atau equivalen 10% dari pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020.

Silakan Anggota dan Bapak Menteri baca dulu.

**F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):**

Itu karena disitu ada kurang lebih berarti "atau kurang lebih equivalen 10%".

**F-PD (Dr. GUNTUR SASONO, M.Si.):**

Atau 600 miliarnya tidak perlu di cabut, equivalen 10%nya saja.

**KETUA RAPAT:**

Ini sudah jelas disini kurang lebih Rp600 miliar atau equivalen 10%, bisa saja Rp700 miliar, bisa saja Rp800 miliar.

**F-PKS (drh. SLAMET):**

Kalau paling sedikit atau sekurang-kurangnya Rp600 miliar bagaimana, sehingga memberikan ruang untuk lebih.

**KETUA RAPAT:**

Pak, ini sudah jelas kurang lebi Rp600 miliar, bisa saja jadi Rp700 miliar, bisa jadi Rp800 miliar.

**ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:**

Kalau kurang lebih bisa kurang juga Pak.

**KETUA RAPAT:**

Itukan ada equivalennya Pak, equivalennya 10% Pak, 10% nya itu Rp 640 miliar.

**F-PD (Dr. GUNTUR SASONO, M.Si.):**

Jadi menurut kami Rp600 miliar itu dihapuskan saja, langsung menuju sebesar equivalen 10%.

**ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:**

Setuju sekurang-kurangnya 10%.

**KETUA RAPAT:**

Pak Menteri, bagaimana Pak Menteri?

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Pak Ketua, usul.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Kalau angkanya terhadap operasional itu tidak pas untuk menetapkan anggaran. Prinsip anggaran itu angkanya adalah mutlak, absolut, jadi kalau Rp 600 miliar ya Rp 600 miliar.

**KETUA RAPAT:**

Pak Hermanto ini usulan, nantikan Kementerian akan menghitung ulang baru kita putuskan Rapat Kerja lagi berapa anggarannya. Ini patokan dari kita, usulan dari kita, ini baru usulan saja Bapak Hermanto. Karena tadi Bapak Menteri mengatakan nanti akan disisir kembali sesuai dengan tadi tanggapan Anggota, itulah Bapak Hermanto.

Silakan Bapak Menteri jawab dulu Pak Menteri.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Terima kasih Pak Ketua.

Kami tidak masalah dengan kesimpulan yang kedua, akan ada adhoc dari Kementerian Inpres dari Dirjen Anggaran bahwa anggaran semua Kementerian akan dipotong 15% termasuk anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, ini sementara yang kami laporkan. Secara prinsip apakah itu termasuk 15% nanti akan didalam ini atau akan terpisah Pak Ketua, mohon arahan.

**KETUA RAPAT:**

Jadi begini Pak Menteri, Pak Menteri laporkan saja kepada Kementerian Keuangan bahwa kami sudah refocusing dan realokasi untuk Bansos. Jadi tolong nanti dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan hal tersebut, itulah Bapak Menteri.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Baik, Bapak Menteri.

Terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Pak Menteri setuju?

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Kesimpulan nomor 2 setuju Bapak Ketua, tapi saran saya kalau inikan baru usulan jadi nanti teknisnya kan baru akan kami usulkan kepada Bapak Ketua lagi.

Terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Iya, nanti kan Pak Menteri tadi bilang akan menyisir kembali, syukur-syukur dapat Rp700 miliar, Rp800 miliar untuk sebagian besar untuk Bansos, kan begitu Pak Menteri.

Anggota?

**(RAPAT: SETUJU)**

3. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan memprioritaskan program-program untuk penyanggah produksi komoditas perikanan dan pergaraman dalam memenuhi kebutuhan panga nasional terutama ikan, serta memberikan paket stimulus ekonomi di sector kelautan dan perikanan, seperti kemudahan restrukturisasi pinjaman kepada UMKM, unit pengolahan ikan (UPI), eksportir, serta masyarakat yang terkena dampak COVID-19 dalam rangka pemulihan ekonomi.

Anggota?

Pak Menteri?

Setuju lah kalau Hermanto dia sahabat saya.

Pak Menteri setuju?

**F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si., M.P.A.):**

Ketua, menambahkan sedikit.

**KETUA RAPAT:**

Iya bagaimana Mbak Luluk mau ngomong apa.

**F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si., M.P.A.):**

Menambahkan sedikit Ketua, ijin Ketua boleh menambahkan sedikit.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Mbak Luluk.



**F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si., M.P.A.):**

Redaksinya sudah setuju, tetapi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa problem yang sangat besar yang dihadapi mereka kan juga terkait pengadaan pakan. Jadi kemudahan stimulus itu selain unit pengolahan ikan kalau bisa juga pakan ikan itu dimasukkan dimana gitu loh.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya Pak Menteri, silakan.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Untuk pakan ikan termasuk dalam menyangga produksi.

**F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si., M.P.A.):**

Ya itu harus dimasukkan biar tidak impor terus, dari dulu sampai sekarang.

**KETUA RAPAT:**

Ya, kenyataannya impor Mbak Luluk, gimana sih, emangnya bisa diproduksi dalam negeri, kan hanya sebagian kecil.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Pak Ketua, ijin.

**KETUA RAPAT:**

Pak Menteri silakan.

Tolong Anggota kasih Bapak Menteri jawab dulu.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Terima kasih Ibu Luluk.

Tadi saya juga kelewatan bicara masalah penanganan terhadap pakan ini. Jadi langkah pertama, kami mencari solusi alternatif dengan mengoptimalkan pakan-pakan lokal kita dengan menggunakan kearifan-kearifan yang sudah ada, salah satunya adalah maggot.

Nah, yang kedua dalam menyikapi naiknya Dolar, kemudian rencana kenaikan harga pakan yang sudah dilaksanakan ini kami akan memanggil para

pelaku pembuat pakan, karena mereka sudah disurati oleh gabungan pengusaha pakan ternyata jawabannya mereka tidak bisa untuk tidak menaikkan. Padahal hari ini Pemerintah sudah mengeluarkan Perpres untuk memberikan .... Kepada para pelaku usaha, salah satunya bahan-bahan pembuat bahan-bahan pakan yang diimpor itu dibebaskan dari segala macam bentuk bea. Kemudian pajak-pajak usaha dia pun diberikan kemudahan. Jadi ini langkah-langkah yang kami lakukan akan kita minta untuk sementara jangan dulu menaikkan produk harga pakan mereka, ini langkah yang akan kami lakukan. Sementara itu Pak Ketua.

Kesimpulan nomor 3 kami setuju Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya setuju.

**(RAPAT: SETUJU)**

Yang keempat Anggota tolong baca dulu, dibaca dulu Anggota, Bapak Menteri dibaca dulu baru nanti saya bacakan yang kurang dan lebih ditambahkan.

**F-NasDem (FAUZI H. AMRO, M.Si.):**

Waktunya Ketua, berapa lama waktunya.

**KETUA RAPAT:**

Anggota setuju, atau Bapak Menteri ada.

**F-NasDem (FAUZI H. AMRO, M.Si.):**

Setuju Pak Ketua, Cuma ditambahkan waktunya.

**KETUA RAPAT:**

Siap Pak Fauzi, sebentar Bapak Fauzi kita tanya Menteri dulu. Berapa lama Pak Menteri?

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Saya ikut saja kalau seminggu juga cukup Pak.

**F-NasDem (FAUZI H. AMRO, M.Si.):**

Setuju seminggu,

**F-PKS (JOHAN ROSIHAN, S.T.)**

Senin depan kita terima.

**KETUA RAPAT:**

Kalau gitu Senin depan kita Rapat Kerja lagi untuk memutuskan, gitu?

**F-PKS (JOHAN ROSIHAN, S.T.)**

Iya, setuju ketua, Senin depan Rapat Kerja.

**KETUA RAPAT:**

Cuman jangan Rapat Kerja-Rapat Kerja pada di rumah semua. Saya yang memimpin terus ini jadinya.

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera memberikan usulan anggaran refocusing kegiatan dan realokasi anggaran paling lama 7 hari kerja.

**F-PKS (JOHAN ROSIHAN, S.T.)**

Sebelum Rapat Kerja hari Senin Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Tanggal masukkan.

**F-NasDem (FAUZI H. AMRO, M.Si.):**

Sebelum Rapat Kerja tanggal 13.

**KETUA RAPAT:**

Coba Anggota dibaca dulu.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Saya usul Bapak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (BUDISATRIO DJIWANDONO)**

Saya ulangi refocusing itu "S" nya satu, di point 1 juga diedit *refocusing*, "S" nya satu di point nomor 1.

**KETUA RAPAT:**

Yang nomor 4 ada lagi Anggota? Setuju.

Bapak Menteri?

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya, Pak Hermanto.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Saya waktu nego Rapat Kerja terdekat, khawatir nanti tanggal 13 ini kita tidak tahu apa yang terjadi.

**KETUA RAPAT:**

Tadikan saya bilang selambat-lambatnya 7 hari, tapi ada Anggota yang meminta dicantumkan tanggalnya.

Anggota setuju?  
Bapak Menteri setuju?

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Setuju Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT: SETUJU)**

Pak Menteri, saya minta selambat-lambatnya hari Jum'at tolong bahannya diberikan kepada kami Pak Menteri.

Pak Menteri.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Iya Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Pak Menteri, minta tolong hari Jum'at bahannya sudah diberikan kepada kami ya.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Mudah-mudahan hari Kamis Pak Ketua, sudah selesai.

**KETUA RAPAT:**

Jadi rancangan kesimpulan rapat ini sudah dapat diterima?

**(RAPAT: SETUJU)**

sebelum kami menutup Rapat Kerja ini, kami persilakan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan kata penutup dalam Rapat Kerja ini.

silakan Bapak Menteri.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Ketua, sebelum saya menyampaikan kata penutup, saya mau tanya kepada Bapak Ketua. Bapak Sumail masih di Komisi IV DPR RI tidak Pak?

**KETUA RAPAT:**

Masih Bapak Menteri.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Saya mau tanya kepada Bapak Ketua dulu, Bapak Sumail perlu dipertahankan di Komisi IV DPR RI tidak Pak?

**KETUA RAPAT:**

Jangan dipindahkan dong tetap Komisi IV DPR RI Pak Menteri, beliau kan teman saya dulu pernah jalan-jalan ke Cina sama saya.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Ketua, sekali lagi terima kasih.

Kayaknya kalau Rapat Kerja-Rapat Kerja selanjutnya kita pakai video conference saja sampai 5 tahun yang akan datang.

**KETUA RAPAT:**

Pak Menteri, silakan kata penutupnya.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Terima kasih atas perhatiannya, saya percaya dalam kondisi yang terbatas semangat kita tidak akan pernah kendur. Dan kami yakin ini hanya ujian sementara, COVID-19 bukan masalah yang sebenarnya kalau saya boleh berkomentar adalah flu seperti flu kita hanya saja penyebarannya sangat massif dan luar biasa. Kuncinya adalah social distancing dan menjaga imunitas dengan menguatkan daya tahan tubuh, ikan adalah solusi kita.

Bapak Ketua, kami siap dengar semua arahan dari Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI. Kami sangat bersyukur menjadi bagian dari keluarga besar komisi IV DPR RI. Dan kami sangat bersyukur selalu mendapatkan dukungan dari Komisi IV DPR RI.

Terima kasih dari seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami tetap semangat selama didukung oleh Bapak dan Ibu Komisi IV DPR RI.

*Wabillahit Taufiq Walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Menteri atas iklannya.

Cuma Pak Menteri cuman beriklan tapi tidak pernah mengirim Anggota Komisi IV DPR RI ikannya. Terima kasih dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan. Dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbil alamin*, Rapat Kerja ini kami tutup.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.45 WIB)**

a.n. Ketua Rapat  
Sekretaris Rapat,

Ttd.

**Drs. Budi Kuntaryo**  
NIP. 196301221991031001